



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



PERIODE 04 JULI 2023



Title	Apa Gunanya Naik Kelas kalau Daya Beli Merosot	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Ers/SB/YK/E-9	

Pengelompokan Ekonomi | Bank Dunia Masukkan RI Lagi ke “Upper Middle Income Countries”

Apa Gunanya Naik Kelas kalau Daya Beli Merosot

- » Presiden mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak mudah pada semester II-2023.
- » Kurs rupiah jangan sampai melemah tidak terkendali dan harga pangan melambung.

JAKARTA - Indonesia diminta tidak cepat merasa puas setelah Bank Dunia memasukkan kembali ke dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas atau *upper middle income countries*. RI kembali ke posisi tersebut terhitung per 1 Juli 2023 berdasarkan pendapatan nasional bruto (*gross national income/ GNI*) per kapita dalam dollar AS terkini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7), mengatakan proses pemulihan yang cepat menyebabkan RI kembali ke *upper middle income countries*, setelah turun ke kelompok *lower middle income countries* pada 2020 karena pandemi Covid-19.

Meski demikian, Presiden mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester II-2023 karena instabilitas lingkungan global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

“Ini berimbang pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah, kelihatan ekspor kita

juga menurun, kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat,” kata Jokowi.

Presiden juga mewanti-wanti mengenai pergerakan tingkat suku bunga dan inflasi global yang masih relatif tinggi. Selain itu, terdapat fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.

Bank Dunia membagi perekonomian menjadi empat kelompok berdasarkan pendapatan, yakni berpendapatan rendah (*low*) dengan pendapatan GNI per kapita kurang dari 1.135 dollar AS, negara berpendapatan menengah rendah (*lower-middle*) dengan GNI per kapita 1.136 hingga 4.465 dollar AS, negara berpendapatan menengah tinggi (*upper-middle*) dengan GNI per kapita 4.446 hingga 13.845 dollar AS dan berpendapatan tinggi (*high income*) dengan pendapatan di atas 13.845 dollar AS.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan ketika naik kembali ke posisi *upper middle income countries*, memang Indonesia akan memperoleh manfaat berupa bunga pinjaman yang lebih rendah di pasar karena rating utangnya lebih baik, sehingga lebih dipercaya investor dan mitra dagang.

“Tetapi, jangan senang dulu, Indonesia juga akan lebih banyak meminjam dari skema pasar bukan menggunakan skema hibah dan skema pinjaman lunak (*soft loan*) yang bersifat bilateral-multilateral,” kata Bhima.

Pendapatan per Kapita Indonesia (dollar AS/tahun)



Sumber: Worldbank

KORAN JAKARTA/ONES

Selain itu, fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP) yang merupakan fasilitas ekspor ke AS, bisa dievaluasi karena Indonesia dianggap sudah tidak layak mendapat fasilitas penurunan tarif dan bea masuk ke negara maju.

Sementara itu, peneliti ekonomi, Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan bagaimana menumbuhkan perekonomian yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang agar bisa keluar dari *middle income trap*.

Bangun Desa

Dari Surabaya, pakar pertanian UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, me-

ngatakan untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam *upper middle income countries* di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu membangun korporatisasi pertanian yang kuat terutama di perdesaan agar terjadi pemerataan.

“Dengan pertanian yang maju, kemandirian pangan bisa kita rintis dan capai sehingga menghemat devisa. Kuncinya adalah konsep agropolitan dilakukan oleh petani di perdesaan, bukan pemilik modal, supaya mereka bisa menjual produk bernilai tambah dan petani bisa mendapat keuntungan yang adil sehingga terjadi pemerataan pendapatan di desa,” kata Zainal.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan semua pembambil kebijakan, baik menteri, kepala daerah, maupun Gubernur BI harus menerjemahkan kerisauan Presiden Jokowi.

“Inflasi dan suku bunga global jadi perhatian utama Presiden, bahkan meminta kepala daerah tidak segan-segan mengeluarkan dana tambahan untuk stabilitas harga pangan,” kata Susilo.


Bank Indonesia, jelasnya, juga harus benar-benar mengantisipasi melemahnya rupiah dengan kebijakan suku bunga. Jangan sampai rupiah melemah tidak terkendali dan harga pangan melambung.

“Apa gunanya jadi negara pendapatan menengah atas, tapi daya beli merosot, rakyat jadi miskin” pungkas Susilo.

■ ers/SB/YK/E-9

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Ant/G-1	

Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan


JAKARTA - Warga Ibu Kota diminta menggunakan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) saat ke pusat perbelanjaan, toko, swalayan, ataupun pasar tradisional. “Kami berharap kesadaran warga, pengunjung, dan pembeli untuk tidak menggunakan kantong plastik di pasar tradisional. Bawa kantong belanja sendiri, termasuk belanja ikan dan daging,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Senin (3/7).

Menurut Asep, pengurangan sampah plastik pasar tradisional masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Hal itu mengingat kebutuhan penjual dan pembeli di pasar tradisional terhadap sampah plastik masih tinggi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan pengelola pusat perbelanjaan di pasar modern lebih ketat dari pasar tradisional.

Asep menyebutkan sosialisasi dan pengawasan Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan KBRL kepada bisnis atau usaha modern seperti pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar tradisional sudah dilakukan sejak 2019. Pasar tradisional menjual bahan pangan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan yang memang masih diperbolehkan untuk menggunakan plastik sekali pakai karena bahan pangan tersebut belum diberi kemasan apa pun.

Sementara itu, pasar modern, kata Asep, sayur-mayur dan aneka daging sudah dibalut rapi dengan plastik pembungkus makanan (*wrapping plastic*) sehingga tidak diperlukan lagi plastik sekali pakai. “Hal inilah yang menyebabkan pasar tradisional terlihat lebih aktif dalam penggunaan plastik sekali pakai daripada ritel modern,” jelas Asep.

Pemprov DKI Jakarta juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW. Pergub tersebut merupakan salah satu upaya mengencangkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Salah satunya meminimalisir timbunan sampah plastik dari sumbernya. ■ **Ant/G-1**

Title	Kenaikan Harga Cabai Merah Semakin Mengkhawatirkan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	2	
Author	Hani Siregar	

Kenaikan Harga Cabai Merah Semakin Mengkhawatirkan


Masyarakat di Medan, Sumatera Utara mulai mengkhawatirkan kenaikan harga cabai merah di wilayah mereka karena berpotensi sulit untuk dikendalikan setidaknya-tidaknya dalam dua bulan ke depan.

Berdasarkan tren yang dipelajari BPS setempat, harga cabai merah akan bergejolak pada Juli atau dua bulan berturut-turut ke depan. Situasi ini menjadi perhatian karena potretnya (harga cabai merah) memberikan gejolak yang sulit untuk dikendalikan.

Saat ini harga rata-rata cabai merah di Sumut pada Juni memang Rp24.260 per kilogram. Namun, harga tersebut meningkat dari Mei 2023 yang ada di rata-rata Rp16.900 per kilogram.

Bukan cuma itu, ada pergerakan yang memperlihatkan harga cabai merah terus melonjak. Pada tanggal 1 Juli dan 2 Juli, harganya sudah sampai Rp40 ribu per kilogram. Ini mesti menjadi perhatian khusus. Hal tersebut agar cabai merah tidak lagi berada di atas Rp70 ribu per kilogram seperti terjadi pada Juli-Agustus 2022.

*Hani Siregar,
Medan, Sumatera Utara*

Title	Pemerintah Stimulasi Investasi Sektor Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Penanaman Modal | Aturan Baru Disiapkan untuk Dukung Kemudahan Layanan Investasi Pertanian

Pemerintah Stimulasi Investasi Sektor Pertanian

Indonesia berpotensi besar mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pangan dunia sehingga dibutuhkan investasi besar untuk menggenjot kinerja pertanian.

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di sektor pertanian. Salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Terintegrasi (P3T).

Nanti *beleid* itu di bawah salah satu unit Kementan, yakni Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP Kementan). Adapun penyusunan aturan baru ini dilakukan untuk menopang deregulasi dan kemudahan pelayanan sistem perizinan pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementan,

Kasdi Subagyono, mengatakan Permentan ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong investasi pertanian baik dari dalam maupun luar negeri.

"Tentu saja pada saatnya nanti peraturan yang akan kita rancang ini juga harus mendapatkan masukan dari publik serta mendapatkan saran rekomendasi dari publik untuk meningkatkan upaya kita di bidang investasi," ujar Kasdi, di Jakarta, Senin (3/7).

Kasdi mengatakan Indonesia selama ini memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan

pangan dunia. Karena itu, investasi di sektor pertanian menjadi peluang besar bagi investor.

"Ini menjadi arahan Menteri Pertanian untuk senantiasa menjadi fokus dan prioritas, karena memang potensi besar yang kita miliki di sektor pertanian ini menjadikan satu peluang besar bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian memiliki Permentan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan pada Permentan 41 Tahun 2017 ini perlu disesuaikan atau direvisi.

"Saya kira apa yang menjadi agenda saat ini sangat strategis

dan penting dalam upaya menyempurnakan dan mengintegrasikan rancangan peraturan menteri pertanian tentang pelayanan perizinan. Jadi, melalui pelayanan P3T ini kita berharap layanan di pusat PVTTP dapat lebih baik lagi ke depannya," katanya.

Kepala Pusat PVTTP Kementan, Leli Nuryati, mengatakan perbaikan layanan yang terintegrasi pada P3T ini meliputi Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU.


"Kemudian, ada juga perizinan non-berusaha yang diberikan melalui pencermatan yang mendalam, PB dan PB-UMKU Non-Transaksional melalui PP 5 Tahun 2021. Sedangkan untuk perizinan non-berusaha dan PB UMKU transaksional dapat melalui P3T. Ke depan rancangan ini menjadi payung hukum

layanan perizinan baik Pusat PVTTP maupun bagi pemohon atau pelaku usaha dan investor baru," katanya.

Tingkatkan Layanan

Leli menambahkan Kementan bersama pihak terkait tetap fokus pada penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan permentan tentang pelayanan perizinan pertanian terintegrasi dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah di sektor pertanian.

"Kami juga memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha di sektor pertanian, rancangan Permentan P3T ini juga disusun dalam rangka mengintegrasikan layanan perizinan pertanian di Kementan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel, transparan dan aman kepada pemangku kepentingan Kementan," jelasnya. ■ **ers/E-10**

Title	DIGITALISASI PENEBUS PUPUK BERSUBSIDI	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	13	
Author	Antara/Fikri Yusuf	

DIGITALISASI PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI



Antara/Fikri Yusuf

Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky (*kiri*) mengamati pembelian pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi i-Pubers atau Integrasi Pupuk Bersubsidi di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Temesi, Gianyar, Bali,

Senin (3/7). Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama Kementerian BUMN melalui PT Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian untuk memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, serta menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Title	HILIRISASI PRODUK PERTANIAN
Date	4 Juli 2023
Media	Bisnis Indonesia
Page	19
Author	Bisnis/Rachman



■ HILIRISASI PRODUK PERTANIAN



Santri Pondok Pesantren Riyadul Huda menggarap lahan untuk ditanami cabai di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (3/7). Pasca bergabung dengan program One Product One Pesantren (OPOP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ponpes Riyadul Huda menargetkan membuat hilirisasi produk pertanian yang diproduksinya seperti cabai, mentimun hingga pare, menjadi produk sambal hingga keripik demi memiliki nilai tambah.

Bisnis/Rachman

Title	INFLASI JUNI 0,14%
Date	4 Juli 2023
Media	Bisnis Indonesia
Page	11
Author	Bisnis/Eusebio Chrynamurti




■ INFLASI JUNI 0,14%



Bisnis/Eusebio Chrynamurti

Pedagang menata dagangannya di salah satu pasar di Jakarta, Senin (3/7). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Juni 2023 tercatat sebe-

sar 0,14% (*month-to-month/MtM*) yang dipengaruhi oleh momentum Iduladha 1444 Hijriah.

Title	Kawasan Cirebon Timur Tersendat Aturan RTRW	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	6	
Author	K45	

| INVESTASI DAERAH |

Kawasan Cirebon Timur Tersendat Aturan RTRW

Bisnis, CIREBON — Pengembangan kawasan Cirebon Timur di Provinsi Jawa Barat berisiko tersendat menyusul revisi rencana tata ruang wilayah yang tak kunjung usai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengungkapkan bahwa rencana revisi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 7/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terganjal di legislatif.

Menurutnya, rancangan tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun, imbuhnya, beleid ini masih menunggu persetujuan pihak legislatif.

“Sudah tanda tangan oleh

sekda provinsi dan daerah tinggal selanjutnya menunggu dari legislatif untuk dihantarkan ke Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian,” katanya di Cirebon, Senin (3/7/).

Hilmi menjelaskan bahwa proses revisi tersebut memiliki tenggat waktu dan terancam mengulang kembali dari awal kalau melebihi batas yang ditentukan.

“Kalau terlambat, pengembangan kawasan Cirebon Timur juga akan terhambat. RTRW ini upaya pemerintah menjaga lahan produktif dan memastikan lahan tidak produktif bisa ditempati industri,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menambahkan ada beberapa poin


yang direvisi dalam beleid itu salah satunya soal penetapan kawasan industri.

Saat ini, imbuhnya, Kabupaten Cirebon tidak memiliki kawasan khusus untuk industri.

Imron mengatakan bahwa dalam perda tersebut kawasan timur bakal menjadi kawasan industri, sedangkan wilayah barat, tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian.

“Wilayah barat itu pertaniannya sangat produktif, maka harus dipertahankan. Di timur, kurang cocok untuk pertanian, makan diarahkan jadi kawasan industri,” jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, wilayah Cirebon juga ditunjang dengan akses Tol Trans Jawa, jalur laut, jalur kereta, dan jalur udara. (K45)

Title	Siasat Menjaga Harga Gula Tetap 'Manis'	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	1 Part 1	
Author	Hendra Wibawa	

Siasat Menjaga Harga Gula Tetap 'Manis'

Hendra Wibawa
hendrawibawa@bisnis.com

Harga gula pasir di pasaran sedang bergejolak. Harga komoditas itu terus naik selama semester pertama tahun ini.

Tak pelak, pemerintah pun merespons dengan menyiapkan aneka kebijakan untuk menjaga keseimbangan harga di hulu dan hilir agar tak berdampak buruk bagi masyarakat maupun industri gula nasional.

Data pergerakan harga gula kristal putih (GKP) secara nasional mencatat harga gula mencapai

puncaknya pada Senin (3/7) sebesar Rp14.700 per kilogram (kg). Padahal, harga GKP secara nasional sempat menyentuh Rp14.348 per kg pada 2 Januari 2023.

Pada 3 April 2023, harga GKP sempat mencapai Rp14.401 per kg meskipun pemerintah mendatangkan gula impor sebanyak 2.000 ton melalui pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Kedatangan 2.000 ton gula itu merupakan bagian dari komitmen impor 32.500 ton gula yang kedatangan PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero)/ID Food melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk memenuhi stok selama Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Untuk menahan gejolak harga gula selama momen Lebaran, ID Food memang menyiapkan 127.900 ton gula yang berasal dari impor dan 20.000 ton dari pengadaan lokal.

Imporasi GKP direalisasikan sebelum Lebaran hingga Mei tahun ini. Langkah itu dilakukan guna menahan anjloknya harga GKP di tingkat petani pada saat

musim giling tebu pada pertengahan tahun ini.

Di tengah realisasi impor gula, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat edaran (SE) pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dengan harga paling rendah Rp12.500 per kg.

SE Bapanas No. 159/TS.02.02/K/6/2023 itu memberikan peluang kepada petani meraup keuntungan dari penjualan GKP dari sebelumnya hanya Rp11.500 per kg.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penerbitan SE itu bertujuan menjaga keseimbangan


harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu. SE itu juga memberikan kepastian peningkatan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan.

"Sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," ujarnya, Senin (3/7).

Arief mengungkapkan kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani tidak terlepas dari kenaikan biaya produksi serta biaya distribusi.



• Bersambung ➤ 3

Title	Siasat Menjaga Harga Gula Tetap 'Manis'	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	1 Part 2	
Author	Hendra Wibawa	

Siasat Menjaga Harga Gula Tetap 'Manis' (Sambungan dari Hal. 1)

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, terjadi kenaikan BPP sebesar 9,08%, dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650.000 per ton tebu.

Bapanas juga mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan pergulaan nasional seperti Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Asosiasi Gula Indonesia (AGI), hingga Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gagpindo).

"Asosiasi dan pelaku usaha mengusulkan agar dilakukan penyesuaian harga gula konsumsi, baik di tingkat produsen maupun konsumen," katanya.

Bapanas juga membahas masalah pergulaan bersama kementerian/lembaga terkait serta pelaku usaha gula.

"Jadi harga pembelian GKP di tingkat petani sebesar Rp 12.500 per kg ini telah melalui proses diskusi yang panjang dan pembahasannya melibatkan seluruh stakeholder gula nasional. Kita lakukan agar memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak," katanya.

Arief menjamin penerbitan SE itu bisa mempercepat penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11/2022 yang juga mengatur tentang harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen.

Tanggapan bernada positif datang dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI). Sekretaris Jenderal AGI Aris Toharisman mendukung penetapan harga pembelian gula di tingkat petani sebesar Rp12.500 per kg. Bila penetapan harga GKP lebih dari itu, dia khawatir produksi gula petani akan sulit terserap.

"Bapanas itu melihat betul kondisi di lapangan, di mana harga gula di pasar tradisional sudah naik, sudah Rp14.000-an. Maka dari itu, harga acuan itu penyesuaian apa yang sudah terjadi di lapangan. Produsen itu sudah membeli sudah di atas Rp12.000-an, hari ini Rp12.300 per kg," kata Aris kepada *Bisnis*, Senin (3/7).

Aris juga menyoroti pihak petani tebu yang mengusulkan

harga pembelian Rp13.500 per kg. Menurutnya, harga sebesar itu kurang realistis. Alasannya, komoditas gula ditetapkan oleh mekanisme pasar dan pemerintah belum bisa menjadi off taker.

"Kalau ini dilepas ke pasar dengan Rp13.000, misalnya, siapa yang mau ngambil? Kecuali ada kunci penyangga sehingga itu bisa berlaku. Jadi menurut saya *reasonable*-lah Rp12.500 itu," ujarnya.

Aris juga memperkirakan harga gula domestik terus merangkak naik seiring dengan situasi harga pasar global yang memang sedang tinggi.

Dia mencatat harga raw sugar sudah mencapai 27 sen dolar AS per ton. Harga itu tertinggi selama 12 tahun terakhir. "Kita juga mengimpor gula 55% dari kebutuhan gula nasional, itu berdampak pada gula konsumsi kita," tuturnya.

Selain impor, fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan bakal berimbas pula pada produktivitas tebu nasional. Aris memprediksi pada Agustus sudah mulai terlihat dampaknya

kendati saat ini belum terasa.

"Kemarin itu 72 ton rata-rata per hektare [produksinya]. Tahun ini akan di bawahnya. Ini akan berpengaruh jumlah tebu yang digiling. Nanti akan terjadi kekeringan berpengaruh produktivitas. Paling mentok mungkin 70 ton aja rata-rata turunnya," jelas Aris.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal APTRI M. Nur Khabsyin berpendapat kenaikan GKP di tingkat petani menjadi Rp12.500 per kg belum ideal.

"Secara hitung-hitungan biaya produksi belum sesuai karena ada kenaikan penggunaan pupuk nonsubsidi yang menyumbang kenaikan biaya produksi itu 15%. Lalu ada kenaikan upah tenaga kerja dan transportasi," kata Nur kepada *Bisnis*, Senin (3/7).

Idealnya, dia berpandangan kenaikan harga pembelian GKP semurah-murahnya Rp13.500 per kg. Bahkan, dia mengusulkan patokan harga gula di tingkat petani sebesar Rp15.000 per kg. Namun, ujarnya, usai bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usulan tersebut disepa-


kati menjadi Rp13.500 per kg.

Nur juga khawatir produktivitas tebu turun apabila kenaikan harga tebu tidak menguntungkan petani. Bahkan, dia memperkirakan produksi gula nasional bakal anjlok hingga 30% dipicu fenomena kekeringan akibat El Nino.

Kementerian Pertanian mencatat pada 2022 produksi GKP nasional sebesar 2,45 juta ton yang diperoleh dari luas area 488.982 hektare. Produksi GKP nasional itu meningkat sekitar 2,34% dibandingkan dengan produksi GKP pada 2021, begitu juga jumlah tebu digiling meningkat 12,67%.

"Artinya petani babak belur. Di sisi biaya produksi naik, terus ditambah lagi terjadi penurunan produksi akibat El Nino," paparnya.

Oleh karena itu, dia menilai penetapan pembelian GKP di tingkat petani Rp12.500 belum cukup menanggung biaya produksi. Apalagi untuk menutup penurunan produksi. Itu kan penurunan produksi 30% itu *full* ditanggung petani," tutur Nur. *(Indra Gunawan)*

Title	Bapanas Kerek Harga Pembelian Gula Kristal	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	

Bapanas Kerek Harga Pembelian Gula Kristal

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di tingkat petani dari Rp 11.500 per kilogram (kg) menjadi minimal Rp 12.500 per kg. Kebijakan ini diharapkan bisa mengerek minat petani menanam tebu.

KENAIKAN pembelian gula itu tertuang Dalam Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023, tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih Di Tingkat Petani.

Kebijakan ini berlaku per 3 Juli 2023. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung.

Dengan pendapatan yang baik, diharapkan dia, minat petani menanam tebu meningkat sehingga mengerek produksi gula.

"Ini akan mendorong peningkatan ketersediaan tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," kata Arief dalam keterangan tertulis, kemarin.

Penerbitan SE ini sekaligus menjadi langkah percepatan

penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani, sampai diterbitkannya Perubahan Peraturan Bapanas Nomor 11 tahun 2022 yang juga akan mengatur tentang harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen.

Diterangkan Arief, saat ini *draft* Perubahan Peraturan Bapanas Nomor 11 tahun 2022 telah melalui proses harmonisasi antar Kementerian/Lembaga dan masih dalam proses pengundangan.

Untuk memastikan agar pemberlakuan harga pembelian di tingkat petani tersebut berjalan dengan baik dan presisi, Bapanas berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawalan implementasi harga di lapangan.

"Seperti kita ketahui, jaringan Polri sangat luas dan masif di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan kerja sama yang baik, kebijakan penyesuaian harga

gula konsumsi dapat merata dan tepat sasaran," ungkapnya.

Arief menerangkan, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani sangat dibutuhkan petani karena adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi.

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), telah terjadi kenaikan BPP dari Rp 589.229 per ton tebu menjadi Rp 650.000 per ton tebu atau naik 9,08 persen.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini," tegas Arief.

Dalam hal proses pembahasan penyesuaian harga gula konsumsi, Arief memastikan pihaknya mendengar masukan dan aspirasi dari seluruh *stakeholder* perguruan nasional, seperti Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO), serta pelaku usaha.



ARIEF PRASETYO ADI


Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyambut baik kenaikan harga pembelian gula di tingkat petani.

"Karena sebelumnya, walaupun kami sudah bisa membentuk harga sampai Rp 12.500, tapi masih saja ada pihak yang jual

gulanya di kisaran Rp 12.000, bahkan ada yang di bawah itu. Dan itu berpengaruh terhadap lelang gula," kata Soemitro.

Dengan adanya SE tersebut, diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang menjual gula di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah. ■ NOV

"Ini akan mendorong peningkatan ketersediaan tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional."

Title	Inovasi Puteh Jadi Inspirasi Milenial	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	UMM	

Dapat Gelar Dari Kampus Korsel Inovasi Puteh Jadi Inspirasi Milenial

DELEGASI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan *study reference* ke Korea Selatan (Korsel). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin ini mengikuti acara *1st Gumi Education Forum* di Kyungwoon University, Korsel.

Dalam kegiatan ini, Kyungwoon University menganugerahkan gelar Profesor Honoris Causa kepada salah satu anggota DPD asal Aceh, Abdullah Puteh. Penganugerahan ini diberikan Rektor Kyungwoon University Prof Kim Dong Jee, disaksikan Sultan Bachtiar Cs.

Dalam sambutannya, Rektor Kyungwoon University Prof Kim Dong Jee menjelaskan alasan pihaknya menganugerahkan gelar Professor Honoris Causa kepada Puteh. Dia bilang, inovasi dan terobosan mantan Gubernur Aceh itu banyak menginspirasi milenial.

“Beliau menjadi pemimpin di saat daerahnya berada dalam eskalasi konflik yang tinggi dan tajam. Namun, dengan *humble* dan bersahaja, Puteh mengawali pembicaraan-pembicaraan antarpihak menuju persaudaraan dan persatuan. Ini untuk mewujudkan semua cita-cita, peradaban, dan misi kemanusiaan di Aceh,” kata Prof Kim Dong Jee, Senin (3/7).

Kim teringat dengan jasa


Puteh saat Aceh diterjang bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Puteh gerak cepat menggagas program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) berupa pemberian fasilitas benih, alat-alat pertanian, dan permodalan mikro.

“Kyungwoon University sangat menghargai dan mengapresiasi semua ini sebagai karya ilmiah yang tidak pernah dituliskan oleh Abdullah Puteh,” tambah Kim.

Dia senang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia khususnya DPD. “Kami sungguh merasa bahwa Indonesia, termasuk Aceh, adalah saudara kami yang dekat dan seperjuangan,” tutup Kim disambut tepuk tangan meriah dari seluruh civitas akademika yang hadir, termasuk sembilan senator dari Indonesia.

Di kesempatan sama, Puteh terharu dengan pemberian gelar Professor Honoris Causa dari Kyungwoon University. Dia pun mengutip istilah yang kerap diungkapkan mantan Presiden Korsel Park Chung Hee yang dinilai sangat menginspirasi.

“Aku rela bila kelak aku mati kuburanku diinjak-injak rakyatku, tapi aku takkan berhenti berjuang menghilangkan kemiskinan di negeri ini,” imbuh Puteh menirukan omongan Park Chung Hee. ■ UMM

Title	Penutupan Paksa RPH Ganggu Pasokan Ayam	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	11	
Author	OSP	

DKI Polisikan Komunitas Pedagang

Penutupan Paksa RPH Ganggu Pasokan Ayam

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyangkan tindakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Komunitas Pedagang Ayam Eceran melakukan penutupan paksa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, Jakarta Timur (Jaktim) sehingga tidak beroperasi selama 4 hari, 27 hingga 30 Juni 2023. Padahal, saat itu harga daging ayam di Ibu Kota sedang tinggi.

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) mengungkapkan, tindakan penutupan RPHU merugikan pelaku usaha dan mengganggu rantai pasokan daging ayam.

Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP DKI Renova Ida Siahaan menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali

Kota Jaktim dan Polres Jakarta Timur untuk pengamanan RPHU Rawa Kepiting. "Sudah masuk pelaporan ke polisi, memang harus ditertibkan yang seperti ini agar suasana adem," katanya di Jakarta, Jumat (30/6).

Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu mengawal pemasokan ayam hidup ke RPHU.

Renova menegaskan, RPHU Rawa Kepiting tetap beroperasi, meski pasokan ayamnya sedikit terkendala. "Pada dasarnya RPHU tidak ada libur, hanya ormas ini memaksa, akibatnya pedagang-pedagangnya ketakutan, tindakan ini masuk kekerasan," ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP)

DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Pasar untuk memastikan pasokan ayam tetap berjalan selama penutupan paksa RPHU. "Untuk imbangi pasokan. Kita kerja sama dengan Dharma Jaya dan BUMD terkait," katanya.

Suharini menyangkan aksi penutupan paksa RPHU Rawa Kepiting. Dijelaskannya, RPHU tidak diperkenankan ditutup secara sepihak. Sebab, dapat mempengaruhi pasokan daging yang beredar di masyarakat.

Dinas KPKP juga menyangkan aksi intimidasi yang dilakukan oknum pedagang ayam hingga berujung penganiayaan terhadap pemilik usaha pemotongan daging. "Untuk intimidasi itu hal yang berbeda, kita pastikan ke jalur hukum," imbuhnya.

Sementara Kapolsek Cakung Kompol Syarifah Chaira membeberkan kronologi peristiwa penutupan paksa RPHU Rawa Kepiting. Aksi itu berlangsung pada hari Selasa (27/6) pukul 19.00 WIB. Massa yang mengaku sebagai Komunitas Pedagang Ayam Eceran menghadang kendaraan pengangkut ayam yang masuk ke RPH Rawa Terate dan RPHU Rawa Kepiting.

Mereka menuntut agar tidak ada aktivitas di RPHU selama empat hari. Atas tindakan itu, petugas kepolisian turun ke lapangan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak hingga mendapatkan titik temu.

"Pada pukul 21.20 WIB, massa aksi membubarkan diri, situasi aman kondusif," sebutnya.

Sebelumnya, postingan akun

Twitter @Okki_Sutanto menyebutkan sebuah RPHU di Jaktim dipaksa tutup sementara oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Komunitas Pedagang Ayam Eceran. Penutupan RPHU sepihak itu membuat para pelaku usaha ayam potong tidak bisa beraktivitas selama libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. "Libur bersama dipaksa ormas. Usaha orangtua saya, RPH ayam potong, hari ini ditutup paksa ormas nggak jelas," tulisnya.

Menurut Okki, RPHU Rawa Kepiting dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Jika RPHU ditutup, pedagang tidak bisa memotong ayam di sembarang tempat. Sebab pemotongan hewan memiliki standar higienis dan halal, serta membutuhkan tempat dan peralatan khusus. ■ OSP

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Tebus Pupuk Subsidi Wajib Tunjukkan KTP & Foto Wajah
Date	4 Juli 2023
Media	Rakyat Merdeka
Page	9
Author	IMA



BERBINCANG DENGAN PETANI:
 Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky (berjaket kuning) berbincang dengan petani membahas tata cara menebus pupuk bersubsidi secara digital, di kios Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desa Tremesi, Kecamatan Gianyar, Provinsi Bali, Senin (3/7).

DOK PT PUPUK INDONESIA

Digitalisasi Diyakini Ampuh Cegah Penyelewengan

Tebus Pupuk Subsidi Wajib Tunjukkan KTP & Foto Wajah

Digitalisasi pembelian pupuk subsidi yang dikembangkan PT Pupuk Indonesia (Persero) diyakini ampuh mencegah penyelewengan distribusi komoditas tersebut. Sebab, dalam transaksinya memerlukan proses verifikasi berbasis identitas penerima subsidi.

PUPUK Indonesia tengah melakukan digitalisasi di lima provinsi di Indonesia. Dengan upaya itu, perseroan kini bisa lebih *monitoring* penyaluran tersebut, melalui aplikasi Rekan yang digunakan oleh kios-kios milik mitra perusahaan. Hal ini diyakini membuat penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky, saat mengunjungi kios Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, di Desa Tremesi, Kecamatan Gianyar, Provinsi Bali, pada Senin (3/7) pagi.

Dengan digitalisasi ini, lanjut Panji, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan KTP. Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem.

"Sekarang petani lebih mudah tebus pupuk subsidi. Dan buat kami penyalurannya kian tepat sasaran," ujar Panji.

Dalam aksi ini, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), yang juga memiliki aplikasi serupa,

yaitu T-Pubers.

Kedua pihak berencana mengintegrasikan sistem tersebut, dengan nama I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).

Hingga kini uji coba sudah dilakukan di lima provinsi yaitu Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, Aceh dan Bali, dengan jumlah kios total mencapai 1.115 kios.

Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Kementan terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, melalui digitalisasi.

"Sekarang total ada 697 kios pupuk yang sudah menerapkan sistem ini," ucap Panji.

Dia menjelaskan, sistem ini memiliki banyak manfaat. Misalnya, para pemilik kios makin mudah melakukan pencatatan transaksi secara digital.

Sementara bagi petani, kata dia, proses penebusan pupuk bersubsidinya kian sederhana. Karena tidak perlu isi formulir dan fotocopy yang kerap tercecer. Kini, cukup dengan membawa KTP ke kios dan me-

lakukan foto wajah.

"Bagi kami (perusahaan), proses penyaluran pupuk subsidi kian transparan. Buat Pemerintah, ini juga bermanfaat karena bisa meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima oleh orang yang tidak berhak," ungkapnya.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, ia berharap, uji coba i-Pubers ini bisa terus diperluas dalam skala nasional, khususnya di wilayah-wilayah Indonesia yang menjadi lumbung produksi pangan.

Ia memastikan, keamanan data dalam sistem tersebut karena pihaknya menerapkan protokol keamanan *cyber* dengan ISO3000.

"Tentunya, keamanan data atau identitas para petani ini menjadi prioritas kami agar tetap aman dari serangan *cyber*," katanya.

Seorang petani bernama Pande Wayan tampak antusias melakukan pembelian pupuk di kios tersebut.

Pria berusia 62 tahun itu terdapat dalam sistem penerima subsidi. Ia datang sendiri ke kios untuk menebus pupuk sebanyak 50 kilogram (kg).

Prosesnya cukup mudah dan cepat. Ia hanya menunjukkan KTP, lalu pemilik kios memindai NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada KTP tersebut guna mengakses data terkait jumlah alokasi pupuk bersubsidi miliknya.

Selanjutnya, kios memasukkan jumlah transaksi penebusan, lalu Pande menandatangani bukti transaksi pada layar gawai yang digunakannya.

Pande mengaku, biasanya penebusan pupuk bersubsidi dilakukan oleh ketua kelompok tani. Namun kini, ia harus menebus sendiri pupuk tersebut di kios yang jaraknya dekat dengan tempat tinggalnya.

"Saya harus ambil sendiri sekarang. Tidak bisa diwakilkan. Karena selain KTP harus difoto wajah untuk verifikasi data," tutunya.

Ia mengaku, senang dengan sistem digitalisasi tersebut. Sebab, dirinya terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhannya selama masa tanam.

"Saya kelola tanah 30 are, untuk tanam padi dan palawija. Setiap tahun saya dapat alokasi pupuk 150 kilogram (kg). Setiap masa tanam, ambil 50 kg," katanya.

Sebagai informasi, di dalam kios ditempel brosur soal harga pupuk. Tertulis, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, sesuai keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI), Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022, jenis pupuk urea dibanderol seharga Rp 2.250 per kg, pupuk NPK Phonska Rp 2.300 per kg dan pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300 per kg.

"Saya bersyukur, karena harga

pupuk bersubsidi 3 kali lebih murah dibandingkan yang komersial," akunya.

Pemilik kios Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desak Tri menuturkan, Pupuk Indonesia telah memberikan sosialisasi terkait penggunaan sistem Rekan atau i-Pubers tersebut sejak pertengahan 2022.


"Ada 66 kelompok tani yang terdaftar di kios ini, atau kurang lebih 411 petani. Kalau namanya terdaftar, pasti ketahuan jumlah alokasi pupuknya, berapa yang sudah diambil," katanya.

Menurutnya, bila petani yang bersangkutan tak bisa mengambil sendiri pupuk subsidi, masih bisa diwakilkan oleh ketua kelompok tani.

"Tapi, harus menyertakan surat kuasa yang diberi materai. Karena sekarang sudah pakai digitalisasi, jadi tidak akan bisa sembarang orang tebus pupuk subsidi," terangnya.

Ketua Tim Pupuk Pesticida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Putu Mariami mengimbau, agar para petani mendaftarkan dirinya dan bergabung dalam kelompok tani agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.


"*Alhamdulillah*, yang memang berhak semuanya dapat alokasi pupuk subsidi," tukasnya. ■ IMA

Title	Digitalisasi Penebusan Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Ant	



Digitalisasi Penebusan Pupuk Bersubsidi

Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky (kedua kiri) dan Senior Executive Vice President Operasi Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Gatoet Gembro Nugroho (kiri) mengamati proses pembelian pupuk bersubsidi menggunakan sistem digital di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Temesi, Gianyar, Bali, Senin (3/7/2023). Digitalisasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi ini hasil kerja sama Kementerian BUMN melalui PT Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian untuk memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, serta menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi di tingkat kios, cukup dengan menunjukkan KTP, dan sudah diterapkan di 5 provinsi seperti Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, Bali dan Aceh Besar.

Title	Harga Beras Medium Naik 0,68%	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	


Harga Beras Medium Naik 0,68%

JAKARTA, ID—Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juni 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan Rp 11.525 per kilogram (kg) atau turun 0,85% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan Rp 11.080 per kg atau naik 0,68%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan Rp 10.315 per kg atau turun 1,09%. Dibandingkan Juni 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik 21,35%, 23%, dan 16,58%. Selama Juni 2023, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 896 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, diperoleh 1.128 observasi beras di penggilingan.

BPS juga mencatat, dari 1.553 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama Juni 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 61,30%, gabah kering giling (GKG) 26,27%, dan gabah luar kualitas 12,43%. Selama Juni 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 5.543 per kg atau turun 0,72% dan di tingkat penggilingan Rp 5.673 per kg atau turun 1,04% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp 6.341 per kg atau naik 2,97% dan di tingkat penggilingan Rp 6.460 per kg atau naik 3,13%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp 5.338 per kg atau turun 1,21% dan di tingkat penggilingan Rp 5.453 per kg atau turun 1,18%.

Dibandingkan Juni 2022, rata-rata harga gabah pada Juni 2023 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik 22,13%, 23,16%, dan 24,97%. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Juni 2023 dibandingkan Juni 2022 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik 22,01%, 22,62%, dan 24,68%. “Selama Juni 2023, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 896 perusahaan penggilingan di 31 provinsi,” ungkap Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini yang dipantau dari kanal media sosial BPS, Senin (03/07/2023).

Laporan lain BPS menyebutkan, nilai tukar petani (NTP) nasional Juni 2023 sebesar 110,41 atau naik 0,19% dibanding NTP bulan sebelumnya. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Kenaikan NTP Juni 2023 dikarenakan It naik sebesar 0,42% lebih tinggi dari kenaikan Ib yang sebesar 0,23%. **(ti)**

Title	Harga Gula di Petani Naik Rp 1.000 per Kg	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Ridho Syukra	

Harga Gula di Petani Naik Rp 1.000 per Kg

JAKARTA, ID—Pemerintah menaikkan harga pembelian gula kristal putih (GKP) di tingkat petani Rp 1.000 atau 8,69% menjadi Rp 12.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 11.500 per kg. Hal itu untuk meningkatkan pendapatan petani tebu di tengah musim giling yang sedang berlangsung, juga memacu daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan. Hanya saja, besaran kenaikan itu masih lebih rendah dari keinginan petani yakni minimal di kisaran 17,39-18,26% menjadi Rp 13.500-13.600 per kg.

Oleh Ridho Syukra

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/NFA) menerbitkan Surat Edaran (SE) Bapanas Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian GKP di Tingkat Petani yang ditetapkan pada 27 Juni 2023. SE itu memuat pedoman harga pembelian GKP di tingkat petani. Dalam SE itu disebutkan agar pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp 12.500 per kg. "Harga pembelian tersebut berlaku mulai 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani," jelas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Senin (03/07/2023).

Arief menjelaskan, penerbitan SE itu untuk menjaga keseimbangan harga gula hulu-hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung sekaligus sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga gula konsumsi nasional. "Langkah ini untuk meningkatkan pendapatan petani tebu di tengah musim giling yang sedang berlangsung. Selain itu, ini juga langkah strategis guna meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan," ujar dia. Penerbitan SE ini untuk percepatan penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 11 Tahun 2022 yang juga mengatur harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen.

Saat ini, draf perubahan Perbadan No 11 Tahun 2022 telah melalui proses harmonisasi antarkementerian dan lembaga serta masih dalam proses pengundangan. Harga pembelian GKP di tingkat petani yang baru ini meningkat dari ketentuan sebelumnya dalam Perbadan



Arief Prasetyo Adi

No 11 Tahun 2022. "Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik Rp 1.000 per kg, dari Rp 11.500 per kg menjadi Rp 12.500 per kg," ungkap Arief. Untuk memastikan agar pemberlakuan harga pembelian di tingkat petani itu berjalan baik dan presisi, Bapanas telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawasan implementasi harga di lapangan, Bapanas telah bersurat kepada Satgas Pangan Polri terkait hal itu.

Menurut Arief, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani itu tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi. Berdasarkan survei biaya pokok produksi (BPP) tebu 2023 yang dilakukan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian telah terjadi kenaikan BPP dari Rp 589.229 per ton menjadi Rp 650 ribu per ton tebu atau naik 9,08%. Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini. Bapanas telah mendengar masukan dan aspirasi seluruh stakeholder pergulaan nasional, seperti Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gagindo), serta pelaku

Neraca Gula Konsumsi Indonesia 2023

Variabel	Volume (Ton)
Stok Awal 2023	1.110.517
Perkiraan Produksi Dalam Negeri	2.740.730
Realisasi Impor Januari-Maret	143.648
Rencana Impor April-Desember	847.352
Total Ketersediaan	4.842.247
Kebutuhan (Tahunan)	3.399.974
Kebutuhan (Bulanan)	283.331
Stok Akhir 2023	1.442.273
Ketahanan Stok (Hari)	158

Sumber: Bapanas



usaha. "Asosiasi dan pelaku usaha mengusulkan agar dilakukan penyesuaian harga gula konsumsi, baik di tingkat produsen maupun konsumen," tutur Arief.


Terkait besaran harga yang ditetapkan, kata Arief, sebelumnya pembahasan telah dilakukan dalam beberapa kali putaran dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, seperti Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ombudsman RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), asosiasi, serta pelaku usaha gula. "Harga pembelian GKP di tingkat petani Rp 12.500 per kg ini telah melalui proses diskusi yang panjang melibatkan seluruh stakeholder gula nasional agar memperoleh hasil yang adil," tandas dia.

Minimal Sesuai BPP

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI Soemitro Samadikoen sebelumnya menjelaskan, APTRI telah mengusulkan harga pembelian (harga pokok pembelian/HPP) gula tani disesuaikan menjadi Rp 15 ribu per kg menyusul tingginya BPP akibat naiknya biaya pemakaian pupuk nonsubsidi yang berkontribusi hingga 15%, juga meningkatnya upah tenaga kerja dan bea transportasi. "Tapi karena di lapangan ada perilaku dari pihak-pihak yang

sejajar menjual gula di bawah harga kami dan membuat tren harga gula tani menurun, HPP Rp 12.500 per kg enggak bisa (diterapkan). Kami minta dilindungi pada tingkat hitungan kami yakni pada BPP di kisaran Rp 13.500-13.600 per kg. HPP baru minimal harus sesuai besaran BPP," kata Soemitro saat dihubungi *Investor Daily*.

Penyesuaian HPP menjadi minimal sesuai BPP tidak hanya akan meredam tren penurunan harga di lapangan, tapi juga mengurangi kerugian para petani tebu pada periode 2016-2021 yang kala itu tidak mengalami kenaikan harga gula tani. "Kalau tren harga gula yang menurun di lapangan ini terus dibiarkan, petani yang sudah punya harapan akan kembali bangkit dari kerugian selama 2016-2021 akan pupus," papar dia. Soemitro juga menjelaskan, HPP baru dengan minimal sesuai BPP itu juga akan memberikan harapan bagi petani bahwa tahun depan menjadi awal kebangkitan industri gula nasional. "Perlu digarisbawahi juga, 60% produksi gula itu tebunya ditanam oleh petani, bahkan HGU (hak guna usaha) yang katanya milik BUMN itu sebagian besar dikerjakan oleh petani. Sehingga, unsur petani menjadi penting, terlebih ketika saat ini terjadi gejolak harga di pasar internasional yang kalau gulanya dibawa ke Indonesia maka harganya jauh lebih mahal," kata Soemitro. (tl)


Title	Proses Tebus Pupuk Subsidi Dipermudah	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	

Proses Tebus Pupuk Subsidi Dipermudah

BALI, ID—Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (PI Persero) Panji Winanteya Ruky mengungkapkan, penggunaan aplikasi I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) di kios mempermudah petani menebus pupuk bersubsidi. “Dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Data-data mengenai alokasi, jenis komoditas, dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem. Mudah tebusnya, tepat sarannya,” kata Panji seperti dilansir *Antara* di Gianyar, Bali, Senin (03/07/2023).

Petani tidak lagi kesulitan serta pemilik kios juga dimudahkan. Sementara manfaat lain bagi pemerintah juga dapat meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima oleh orang yang tidak berhak. Bali terpilih menjadi lokasi percontohan (*pilot project*) digitalisasi ini, setelah sebelumnya diterapkan di Aceh, Riau, Bangka Belitung, serta Kalimantan Selatan. “Dengan penerapan sistem digitalisasi ini, penyaluran pupuk menjadi lebih mudah dan tepat sasaran,” tutur Panji. Aplikasi digital yang berbasis NIK tersebut merupakan sistem hasil kerja sama PI dengan Kementerian Pertanian dan saat ini total 697 kios sudah menerapkan sistem ini.


Senior Executive Vice President (SEVP) Operasi Pemasaran PI Gatoet Gembro Noegroho mengungkapkan, pihaknya berusaha mencari sumber bahan baku pupuk NPK dari negara selain Rusia dan Ukraina. Pasalnya, konflik kedua negara itu turut berpengaruh pada suplai pasokan bahan baku ke PI yang belum lancar. “Kalau di sana (Rusia dan Ukraina) masih bermasalah, kita cari sumber lain,” ujar dia. Pasokan bahan baku dari kedua negara masih terbilang rendah karena konflik geopolitik yang belum usai serta distribusi via laut masih mengkhawatirkan. Dengan demikian, PI mencari sumber bahan baku berupa fosfor dan kalium untuk pupuk jenis NPK dari negara lain, seperti Mesir, Yordania, Maroko, bahkan Vietnam, Laos, Myanmar, tapi mungkin volume mereka kecil sehingga harganya bisa jadi lebih mahal. **(tl)**

Title	BONGKAR BAWANG PUTIH	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	10	
Author	MI/Moh Irfan	



MI/MOH IRFAN

BONGKAR BAWANG PUTIH: Pekerja memindahkan karung bawang putih dari truk yang akan membawa ke daerah tujuan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (2/7). Harga bawang putih per 27 Juni 2023 mencapai Rp35.000 per kilogram

Title	Harga Kebutuhan Pokok belum Mau Turun	
Date	4 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	9	
Author	AN/DW/N-2	

Harga Kebutuhan Pokok belum Mau Turun


IDUL Adha telah usai. Namun, harga-harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Di Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam dan cabai merah tanjung sangat tidak bersahabat.

“Harga daging ayam masih mencapai Rp42 ribu per kilogram. Masih tinggi meski sempat turun dari sebelumnya mencapai Rp55 ribu,” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Elly Wasliah, kemarin.

Sementara itu, harga cabai merah tanjung masih bertahan antara Rp80 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Harga kedua komoditas itu belum turun karena permintaan yang masih tinggi.

“Saat permintaan naik, harga pakan ayam juga ikut naik sehingga harga meningkat tinggi. Cabai tanjung juga masih tinggi karena permintaan yang belum turun dipengaruhi tren warga yang banyak menggelar hajatan,” tambah Elly.

Di Palembang, Sumatra Selatan, harga tinggi masih terjadi pada telur, daging ayam, dan sayuran. “Masih banyak yang libur sehingga stok terbatas. Permintaan sudah tinggi sehingga harga pun sulit turun,” kata Nazami, pedagang di Pasar 10 Ulu, Palembang. (AN/DW/N-2)

Title	Inflasi Juni 2023 Dipengaruhi Idul Adha	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	2	
Author	Mir/Ant/X-5	

Inflasi Juni 2023 Dipengaruhi Idul Adha

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,14% (*month-to-month/mtm*) pada Juni 2023. Itu lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang tercatat 0,09% (*mtm*). Kenaikan itu berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen (IHK) di 90 kota dari 114,84 menjadi 115.

"Terjadi kenaikan IHK dari 114,84 pada Mei 2023 menjadi 115,00 pada Juni 2023," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, kemarin.

Penyumbang inflasi utama pada Juni 2023, lanjutnya, ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau

yang tercatat mengalami inflasi 0,39% (*mtm*). Kelompok itu berkontribusi sebesar 0,10% (*mtm*) terhadap tingkat inflasi umum.

Adapun kelompok pengeluaran transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,10% (*mtm*) dan berkontribusi -0,01% (*mtm*) terhadap tingkat inflasi umum Juni 2023. Komoditas utama yang dominan mendorong terjadinya deflasi ialah bensin dan solar.

Pudji mengatakan kenaikan inflasi pada Juni 2023 dipengaruhi oleh momen Idul Adha 1444 H. "Selama tahun 2019 sampai 2023, terjadi inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha, kecuali tahun 2020 yang

mengalami deflasi," katanya.

Berdasarkan catatan BPS, inflasi pada momen Idul Adha 2019 atau pada Agustus tercatat sebesar 0,12%. Kemudian, pada Juli atau Idul Adha 2021 sebesar 0,08% dan Juli atau Idul Adha 2022 sebesar 0,64%. Lalu di momen Idul Adha pada Juli 2020 tercatat deflasi sebesar 0,10%.

Pudji menjelaskan inflasi pada Idul Adha 2023 didorong oleh kenaikan harga pangan

bergejolak atau *volatile food*, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat.

Adapun tingkat inflasi umum secara tahunan (*year on year/yooy*) berada di angka

3,52%. Angka itu turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,00% (*yooy*).

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menilai penurunan tingkat inflasi secara tahunan menunjukkan upaya pengendalian yang dilakukan pemangku kepentingan berhasil dan berjalan dengan baik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia secara keseluruhan sepanjang 2023 tidak akan jauh dari level 4%. (Mir/Ant/X-5)

Tingkat Inflasi di Indonesia

Inflasi month to month

Bulan	Persentase
■ April	0,33
■ Mei	0,09
■ Juni	0,14

Inflasi year to year

Bulan	Persentase
■ April	4,33
■ Mei	4,00
■ Juni	3,52

Kelompok Pengeluaran yang Menyumbang Inflasi Tertinggi

Kelompok	Persentase
■ Transportasi	1,23
■ Makanan, minuman, dan lembakau	0,76
■ Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,48

Indeks Harga Konsumen


Jenis	Nilai
■ Umum	115,00
■ Inti	112,39
■ Energi	116,06
■ Bahan makanan	120,40

Inflasi Tertinggi dan Terendah

- Ambon menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi yakni mencapai 6,10%.
- Gunung Sitoli menjadi wilayah dengan inflasi terendah yakni 1,01%.



Sumber: BPS/Utang MI


Title	Harga Telur Diprediksi Terus Naik	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	11	
Author	Kontan/Baihaki	

Harga Telur Diprediksi Terus Naik



KONTAN/Baihaki

Telur ayam ras dipajang di sebuah pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat, Senin (3/7). Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menuturkan, harga telur ayam ras diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun ini. Pasalnya, biaya pakan ayam petelur terus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan harga pokok produksi (HPP) ikut naik.


Title	Indeks Harga Konsumen	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	2	
Author	Kontan/Fransiskus Simbolon	

Indeks Harga Konsumen



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Pedagang melayani warga yang membeli bahan makanan di Pasar PD Jaya, Manggarai, Jakarta, Senin (3/7). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Juni 2023 mencapai 0,14%. BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) di bulan Juni 2023 sebesar 115, naik dari bulan Mei 2023 yang sebesar 114,84. Penyumbang inflasi terbesar pada Juni tahun ini adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39% dan andil 0,10%.

Title	Inflasi Bakal Terus Melandai Tahun Ini	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	2	
Author	Maria Gelvina Mayscha	

■ INFLASI

Inflasi Bakal Terus Melandai Tahun Ini

JAKARTA. Laju inflasi terus menunjukkan tren menurun pada tahun ini. Kondisi tersebut terlihat dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Per Juni kemarin, BPS mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,14%, naik dari inflasi bulanan Mei 2023 yang tercatat 0,09%. Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,84 pada Mei jadi 115,00 pada Juni 2023.

Namun jika dilihat secara tahunan justru makin melandai. Di periode Juni 2023, inflasi tahunan tercatat 3,52%, turun dari bulan Mei yang tercatat 4%. Sementara dari awal tahun hingga Juni, inflasi sebesar 1,24% *year to date*.

Adapun inflasi tahunan Juni ini lebih rendah dibanding periode Juni 2022 yang sebesar 4,35%. "Ini menunjukkan bahwa inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan sejak Maret 2023," ujar Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam paparan Badan Pusat Statistik, Senin (3/7).

Jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan terbesar senilai 10,18%. Kelompok transportasi menyumbang 1,23% terhadap inflasi umum.

Berdasarkan komoditas, penyumbang terbesar untuk inflasi tahunan Juni 2023 adalah bensin dengan porsi 0,84%, beras 0,38%, rokok kretek filter 0,22%, kontrak rumah 0,13%, dan bahan bakar rumah tangga 0,12%.

Untuk penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Juni

2023 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yakni 0,39% dan berandil 0,10%. Ada pula inflasi daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, kontrak rumah, bawang putih, rokok kretek filter serta ketimun.


Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memprediksi inflasi terus melandai dan berada dalam kisaran 2%-4% secara tahunan dengan target inflasi sekitar 3,60% secara tahunan pada akhir tahun 2023. Asalkan, pemerintah bisa mengelola harga dan pasokan pangan.

Maria Gelvina Mayscha

Laju Inflasi

Periode	Bulanan (%)	Tahunan (%)
Jun '23	0,14	3,52
Mei '23	0,09	4,00
Apr '23	0,33	4,33
Mar '23	0,18	4,97
Feb '23	0,16	5,47
Jan '23	0,34	5,28
Des '22	0,66	5,51
Nov '22	0,09	5,42
Okt '22	-0,11	5,71
Sep '22	1,17	5,95
Agu '22	-0,21	4,69
Jul '22	0,64	4,94
Jun '22	0,61	4,35
Mei '22	0,4	3,55
Apr '22	0,95	3,47
Mar '22	0,66	2,64
Feb '22	-0,02	2,06
Jan '22	0,56	2,18

Sumber: BPS

Title	Harga Gula di Petani Rp 12.500 perkilogram	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	7	
Author	Pikiran Rakyat	

Harga Gula di Petani Rp 12.500/kilogram

JAKARTA, (PR).-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat edaran bernomor 159/TS.02.02/K/6/2023. Di dalamnya, dinyatakan bahwa pembelian gula kristal putih (GKP) di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp 12.500 per kilogram.

"Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp 1.000 per kilogram, dari Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, seperti dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023).

Ia mengatakan, penerbitan SE tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung. Selain itu, penerbitan SE juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan.

Dengan pendapatan yang baik, diharapkan mendorong minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebu. Hal itu dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional.

"Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani," ucapnya.

Menurut dia, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani ini tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi, seperti biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, serta biaya distribusi.

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, telah terjadi kenaikan BPP, dari Rp 589.229 per ton tebu menjadi Rp 650.000 per ton tebu atau naik 9,08%.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai dengan harga keekonomian saat ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden," ucapnya.

Dalam hal proses pembahasan penyesuaian harga gula konsumsi ini, Arief memastikan bahwa Badan Pangan Nasional telah mendengar masukan dan aspirasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pergulaan nasional, seperti asosiasi petani tebu, asosiasi produsen gula, dan para pelaku usaha.***



KHOLID/KONTRIBUTOR "PR"

SEJUMLAH produk gula tersusun di salah satu toko swalayan, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*

Title	Buruh dan Petani Desak Penyelamatan Karet Jambi
Date	4 Juli 2023
Media	Kompas
Page	11
Author	ITA



Kementerian Pertanian



KOMPAS/HIMA TAMBUKAN

Salah satu dari 11 pabrik karet di Jambi tak lagi beroperasi dalam enam bulan terakhir. Tercatat sekitar 800 buruh pabrik karet telah dirumahkan dengan alasan efisiensi. Tampak pabrik karet di kawasan Sejinjang, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 1 Juni 2023.

Buruh dan Petani Desak Penyelamatan Karet Jambi

Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 800 buruh pabrik karet di Jambi tak lagi bekerja. Umumnya mengalami PHK dan sebagian terkena skema pensiun dini.

JAMBI, KOMPAS — Buruh dan petani meminta kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi lemahnya harga komoditas karet yang berkepanjangan di Jambi. Sebagian industri terkulai, diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dan banyak alih fungsi kebun karet.

Persoalan itu mengemuka dalam pertemuan di Dinas Perkebunan Jambi, Senin (3/7/2023), yang dihadiri para pelaku usaha industri karet, petani, dan elemen buruh perkebunan karet.

"Kami berharap ada kebijakan khusus untuk penyelamatan karet yang telah menjadi sandaran masyarakat seabad lebih," ujar Masta Melda, Ketua Hukatan Provinsi Jambi, yang jadi bagian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, dalam enam bulan terakhir, lebih dari 800 buruh pabrik karet di Jambi tak lagi bekerja. Ada buruh yang di-PHK. Ada pula yang masuk skema pensiun dini. Ada pabrik yang telah tutup dan sebagian besar lainnya menjalankan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja. "Pelaku industri beralasan kesulitan bahan baku karena banyak kebun karet sudah beralih menjadi kebun sawit," ucapnya.

Kelompok buruh mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah khusus demi menyelamatkan usaha karet Jambi. Upaya itu misalnya membuat kebijakan larangan alih fungsi lahan di sejumlah wilayah.

Ia pun mendesak ada kebijakan peremajaan karet oleh pemerintah daerah. Sebab, sebagian kebun karet saat ini tidak lagi produktif karena usia tua. Diperlukan juga kebijakan khusus kemitraan hasil panen dan pembenahan di pasar lelang untuk menghindari monopoli harga.

Ketua Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan (UPPB) Olah Karet Provinsi Jambi Susisno mengakui banyaknya petani karet yang kini beralih ke sawit. Hal itu disebabkan harga jual karet di Jambi cenderung lebih rendah dibandingkan di daerah-daerah tetangga.

Akibatnya, banyak petani beralih menjual karet ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Banyaknya hasil panen yang dijual ke luar daerah membuat pabrik lokal kesulitan bahan baku. "Ini jadi seperti lingkaran setan dalam masalah karet," kata Susisno.

Dari sekitar 80 UPPB di Jambi, mulai banyak yang tidak lagi aktif. Bahkan, lahannya sudah

beralih jadi kebun sawit. Ia mendesak ada pembenahan menyeluruh, di antaranya penerapan bimbingan teknis bagi petani untuk menghasilkan karet yang baik.

Peremajaan pun didorong agar tidak dilakukan setengah-setengah. Jangan pula upaya itu dilakukan sebatas pemberian bantuan bibit. Namun, upaya itu perlu juga dilengkapi dengan program pemulihan lahan serta penyediaan pembasmi penyakit alami dan pupuk berkualitas. Terlebih lagi dengan banyaknya tanaman karet diserang gugur daun dan jamur akar putih, banyak petani putus asa karena tak mampu mengendalikannya.

"Kalau dilakukan peremajaan, harus menyeluruh dan total agar penyakit lama tak menyering bibit karet yang baru," ucapnya.

Kepala Dinas Perkebunan Jambi Agus Rizal mengatakan, pihaknya akan membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan itu. Tim akan mendalami masalah itu di lapangan dan bersama-sama mencari jalan keluar. Di sisi lain, ia mendorong petani untuk kreatif di tengah kondisi harga karet yang lemah.

Saat ini, karet di Jambi hanya bernilai Rp 7000 hingga Rp

8000 per kilogram. Untuk menambah penghasilan, petani bisa menerapkan tumpang sari.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jambi Bahari menambahkan, ia telah meminta 11 industri karet di Jambi menyampaikan laporan mengenai kondisi usaha mereka. Ia akan memberikan teguran jika mendapati perusahaan yang tidak melaporkan adanya PHK tenaga kerja. "Saya meminta para pengusaha pengolahan karet ini secepatnya memberikan laporan kepada kami. Jangan sampai ada PHK yang tidak diketahui," kata Bahari.

Sejauh ini, Disnaker Jambi meminta agar jangan sampai ada PHK. Ia mengimbau dilakukan efisiensi agar usaha dapat tetap berjalan.

Perwakilan pengusaha karet, A Tamba, mengatakan, pengusaha karet ingin tetap bertahan. Sejumlah upaya telah dilakukan. Namun, ia pun mengusulkan agar para petani bisa menghasilkan karet dengan kualitas yang baik.

Perdagangan internasional


Persoalan harga karet tidak terlepas dari situasi perdagangan internasional. Dalam acara diseminasi hasil analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BK-Perdag) tahun 2023 bertajuk

"Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan" yang digelar secara hibrida, Rabu (17/5), terungkap upaya Indonesia dan sejumlah produsen karet lain di dunia untuk menjaga harga karet tetap stabil (*Kompas*, 19/5/2023).

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional (ITRC) berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional.

Kepala BK-Perdag Kementerian Perdagangan Kasan Muhi mengatakan, upaya menjaga harga karet itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonnage Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor.

"Skema ini tidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin anjungan tunai mandiri. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet," tutur Kasan. (ITA)

Title	Dialektika Sawit UE-Indonesia	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	7	
Author	Andi Irawan	

Dialektika Sawit UE-Indonesia

Andi Irawan

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu; Ketua Bidang Kebijakan Publik Perhimpunan ASASI

Undang Undang Deforestasi Uni Eropa (European Union deforestation regulation) mulai diimplementasikan 6 Desember 2022.

Isi penting regulasi ini adalah semua komoditas pertanian dilarang masuk ke Uni Eropa (UE), kecuali terbukti tidak dibudidayakan pada lahan deforestasi setelah 2020. Produsen wajib menunjukkan bukti tentang itu, yang bisa diverifikasi. Jika terbukti tak memenuhi syarat yang diminta, produsen yang memasukkan komoditas tersebut akan dikenakan denda yang besar.

Regulasi ini menimbulkan kesulitan bagi produk primadona ekspor Indonesia, khususnya sawit. Komoditas ini sudah kadung dinilai oleh UE sebagai komoditas yang bermasalah dan menjadi sumber penyebab kerusakan hutan tropis dan gambut di dunia, tidak terkecuali sawit Indonesia walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa sawit di Indonesia tak seperti yang dituduhkan UE.

Jokowi pada pertemuan bilateral di sela KTT G7 (*G7 outreach Summit 2023*) di Hiroshima, Jepang, dengan Presiden Komisi Eropa, 21 Mei 2023 lalu, menyampaikan bahwa laju deforestasi di Indonesia sepanjang 2019-2020 telah turun 75 persen jadi 115 hektar. Ini laju terendah sejak 1990 dan akan terus mengalami penurunan.

Tak adil

Perjalanan historis dialektika relasi hubungan ekonomi politik dalam konteks sawit antara UE dan negara-negara eksportir sawit, termasuk Indonesia sebagai penghasil terbesar sawit dunia, menunjukkan hubungan yang tidak pernah ada kesepakatan tentang status sa-

wit sebagai komoditas penyebab deforestasi.

UE percaya bahwa sawit penyebab deforestasi. Sawit adalah komoditas dengan potensi risiko ILUC (*Indirect Land Use Change*) atau Konversi Penggunaan Lahan Tidak Langsung yang tinggi. ILUC merujuk pada efek tak langsung yang terjadi ketika lahan digunakan untuk produksi bahan bakar nabati atau bioenergi.

Parameter ini terkait dengan pergeseran penggunaan lahan hutan menjadi lahan baru yang diperlukan untuk memenuhi permintaan atas tanaman energi atau bahan baku bioenergi. Oleh karena itu, sawit dari belahan negara mana pun harus bisa membuktikan diri bahwa ILUC-nya rendah atau tak menyebabkan deforestasi jika tidak ingin di larang masuk UE.

Tuduhan deforestasi sawit yang berimbas pada kontribusi emisi gas rumah kaca (GRK) hari ini, menurut hemat saya, tak ditempatkan pada bingkai sejarah yang proporsional. Kita tahu pada abad ke-18 pada saat era Revolusi Industri, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat disinyalir sebagai kontributor terbesar emisi GRK dunia.

Tidak ada sanksi atau denda dari dunia terhadap kontribusi emisi GRK yang mereka sumbangkan saat itu. Padahal, tidak bisa dimungkiri tingkat perubahan suhu global hari ini tak bisa dilepaskan dari kontribusi emisi GRK pada saat itu.

Jadi, menuduh pihak lain berkontribusi merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim, lalu menjatuhkan sanksi secara sepihak—tanpa melihat sejarah bahwa yang memberi sanksi pada fase tertentu dalam sejarah peradaban mereka juga pernah melakukan



hal yang sama—menjadi kan tuduhan dan pemberian sanksi itu sebagai sesuatu yang tidak obyektif dan tidak adil.

Memperkuat posisi tawar

Pertanyaan yang paling menggelitik sebenarnya adalah mengapa kita harus peduli terhadap pandangan UE terhadap sawit. UE hanya menyerap 12 persen sawit Indonesia, 88 persen lainnya dari beragam negara lain. Kalau sulit menjalin titik temu tentang status sawit yang bersifat *win-win solution* mengapa kita tak berpandangan, "ya sudah, 12 persen pangsa pasar UE kita ganti saja dengan pasar dari negara-negara lain"? Larangan sawit masuk UE dijadikan pemacu kreativitas dan produktivitas olah sawit lebih lanjut menjadi beragam produk turunan pangan via hilirisasi industri sawit, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor non-UE.

Hilirisasi industri sawit harus semakin dikuatkan, yakni, 1) hilirisasi oleopangan (*oleo food complex*), seperti margarin, es krim, *creamer*, *cocoa butter*, vitamin A, vitamin E. Lalu, 2) hilirisasi oleokimia (*oleochemical complex*), seperti produk biosurfaktan (sabun, sampo, detergen), biolubrikan dan biomaterial. Dan, 3) hilirisasi biofuel (*biofuel complex*), seperti biogas, biopremium, bio-avtur.

Hal lain yang perlu dipahami juga dalam membangun posisi tawar dalam dialektika perdagangan sawit dunia ini adalah bahwa UE sangat membutuh-

kan sawit sebagai sumber biofuel mereka. Pelepasan dari ketergantungan terhadap minyak dari fosil sedang dan telah menjadi perhatian penting UE sejak dua dekade lalu.

Ketergantungan pada minyak mentah sebagai sumber energi merugikan UE, bukan saja karena sumber energi minyak fosil semakin terbatas dan langka, tetapi minyak juga menyebabkan emisi GRK yang disinyalir sebagai biang kerok penyebab perubahan iklim dunia.

Biofuel bukan saja bisa berkelanjutan karena ia *renewable* (bisa diproduksi secara terus-menerus) tetapi juga penggunaannya menekan emisi GRK. Dan UE tidak bisa mencukupi kebutuhan biofuel mereka hanya dari sumber mereka sendiri, seperti dari *rapeseed*, bunga matahari, atau kedelai.

Sekitar 39 persen kebutuhan biofuel mereka berasal dari sawit. Kalau sawit tidak masuk ke UE saat ini, kawasan ini bisa mengalami masalah besar terkait pemenuhan *biofuel*-nya.


Artinya, cara terbaik membentuk posisi tawar negara-negara eksportir sawit dunia terhadap regulasi aturan deforestasi yang diskriminatif terhadap sawit adalah dari kesepakatan negara-negara eksportir sawit untuk tidak memasok sawit ke UE.

Kalau ini bisa dilakukan, UE akan kerepotan untuk menyalahgunakan 39 persen kebutuhan biofuel mereka yang bersumber dari sawit saat ini. Membangun posisi tawar seperti ini perlu dilakukan untuk menempatkan sawit secara obyektif dalam meja dialektika hubungan UE dan negara eksportir sawit.

Posisi tawar negara-negara eksportir sawit akan hadir jika negara-negara eksportir sawit bisa satu kepentingan. Di sinilah pentingnya peran Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia untuk menggagas dan menghadirkan persatuan kepentingan negara-negara produsen sawit dunia tersebut.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN


Title	Harga Daging Ayam Tinggi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	Kompas/Totok Wijayanto	

Harga Daging Ayam Tinggi



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pelanggan berbelanja ayam broiler di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023). Harga daging ayam ras masih bertahan tinggi, yakni pada kisaran Rp 50.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menilai kenaikan harga didorong oleh kenaikan biaya produksi yang naik seiring dengan naiknya harga pakan dan bibit ayam.

Title	Sensus Pertanian 2023, Upaya Wujudkan Satu Data Pertanian Menyeluruh	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	16	
Author	Kompas	

Sensus Pertanian 2023, Upaya Wujudkan Satu Data Pertanian Menyeluruh

Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 (ST2023) pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023. ST2023 merupakan kegiatan penting untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif tentang sektor pertanian di Indonesia.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan, tujuan penting ST2023 yaitu mewujudkan satu data pertanian yang terintegrasi dan dapat dipercaya. Data berkualitas yang terkumpul akan menjadi fondasi bagi pemerintah, para pengambil kebijakan, dan pelaku industri pertanian untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

Namun, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai potensinya secara maksimal. Pada *webinar* bersama Sinar Tani bertajuk "Sensus Pertanian 2023 Perkuat Ketahanan Pangan" 26 Juni lalu, Atqo Mardiyanto menjelaskan setidaknya ada tiga isu pertanian global saat ini.

"Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ada tiga isu kunci utama yang akan dihadapi (pertanian global), yaitu ancaman ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta isu keberlanjutan," kata Atqo.

Ia melanjutkan, isu ketahanan pangan ini juga terkait pengetahuan dan adopsi teknologi yang masih

rendah. Dengan teknologi, kata Atqo, petani sebenarnya bisa meningkatkan hasil panen dan menekan biaya produksinya. "Kalar petani kita menguasai teknologi pertanian, ini sangat membantu dalam mengimbangi permintaan pangan domestik yang terus meningkat."

Disamping itu, sebut Atqo, ST2023 juga untuk memetakan kondisi sarana dan prasarana produksi di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan. Termasuk untuk menilai sejauh mana pertanian nasional telah mengimplementasikan *foodlosses* dan *waste management*.

Sementara itu, terkait kualitas dan keamanan pangan, Atqo mengungkapkan bahwa hal ini bisa berdampak pada penanganan keadaan tengkes (*stunting*) dan gizi buruk secara nasional.

Adapun mengenai isu keberlanjutan pertanian, Atqo menyebutkan ST2023 akan mendata secara detail usia dan latar belakang petani Indonesia. "Petani kita diketahui lebih banyak yang telah berusia tua sehingga memerlukan regenerasi. Kita juga akan melihat keadaan alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dan kondisi kesejahteraan petani untuk mempertahankan produksi pangan."

Satu data pertanian

ST2023 memiliki manfaat dan tujuan yang penting, yakni mewujudkan satu data pertanian yang menyeluruh di Indonesia. Dengan data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan potensi sektor pertanian di Indonesia.

Data ini juga akan memudahkan perencanaan pengembangan sektor pertanian di tingkat nasional dan daerah, serta membantu para pelaku industri pertanian dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.

Di samping itu, dengan adanya satu data pertanian yang terintegrasi, informasi mengenai potensi pertanian di berbagai wilayah Indonesia dapat lebih dipahami. Hal ini akan membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih tepat, memfasilitasi peningkatan produksi pertanian, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pertanian yang maju dan tertinggal.

ST2023 dilakukan dengan menggunakan berbagai moda pengumpulan data yang menyeluruh. BPS menggunakan survei langsung dengan mengunjungi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pertanian lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu,

metode pengumpulan data melibatkan teknologi modern, seperti penggunaan aplikasi *mobile* dan *self enumeration* melalui *website* untuk mempermudah pengisian dan pengumpulan data.

Cakupan pengumpulan data meliputi informasi tentang luas lahan pertanian, jenis tanaman yang ditanam, teknik budi daya yang digunakan, penggunaan pupuk dan pestisida, sistem irigasi yang digunakan, jumlah dan jenis hewan ternak, hasil produksi, dan informasi tentang distribusi dan pemasaran produk pertanian. Data juga mencakup informasi demografis tentang petani, seperti usia, pendidikan, dan jenis kelamin.

Indikator hasil ST2023

ST2023 didesain untuk menghasilkan sejumlah indikator, di antaranya adalah jumlah petani. Sensus ini akan memberikan indikator tentang jumlah petani yang aktif di Indonesia. Data ini akan membantu dalam pemetaan populasi petani dan pemahaman tentang perubahan tren dalam jumlah petani dari sensus sebelumnya.

Indikator lainnya adalah luas lahan pertanian. Indikator ini memberikan gambaran tentang luas lahan yang digunakan untuk pertanian di seluruh



Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto.

Indonesia. Informasi ini penting untuk perencanaan penggunaan lahan, pemantauan perubahan pola penggunaan lahan, dan evaluasi keberlanjutan sektor pertanian.

Indikator berikutnya adalah produksi tanaman dan ternak. ST2023 akan menghimpun data tentang produksi tanaman dan ternak di Indonesia. Indikator ini mencakup jenis tanaman yang ditanam, jumlah panen, produksi pangan, dan produksi ternak. Data ini bermanfaat untuk mengevaluasi produktivitas pertanian dan pemahaman tentang kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.

Indikator selanjutnya adalah teknologi pertanian. ST2023 juga dapat memberikan informasi tentang penggunaan teknologi pertanian di Indonesia, seperti irigasi, mekanisasi, atau penggunaan pupuk dan pestisida. Informasi ini berguna untuk


memahami tingkat adopsi teknologi pertanian dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan teknologi pada masa depan.

Tak ketinggalan adalah indikator tentang tenaga kerja pertanian. Ini meliputi informasi tentang jumlah pekerja pertanian, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan kondisi kerja di sektor pertanian. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan terkait tenaga kerja pertanian.

Sensus Pertanian 2023 menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian di Indonesia. Hasil sementara ST2023 akan dirilis pada Desember tahun ini. Adapun hasil finalnya akan dipublikasi pada 2024. Untuk itu, semua insan pertanian wajib menerima kedatangan petugas ST2023 dan memberikan keterangan dengan benar. [*]



FOTO: FOTO DESK BPS

Title	Kukar Produksi 61 Ribu Ton beras	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Tribun Kaltim	
Page	1 Part 1	
Author	Aul	

Kukar Produksi 61 Ribu Ton Beras

KABUPATEN Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan produksi padi terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melalui Asisten II Sekreta-


riat Kabupaten Kukar, Wiyono membeberkan datanya.

Produksi padi di Kukar mencapai 106.117,23 ton gabah kering giling (GKG) atau 61.725,02 ton jika dikonversi menjadi

beras.

"Capaian sebanyak ini diperoleh dari lahan seluas 26 ribu hektar di Kabupaten Kukar," kata Wiyono, Senin (3/7/2023).

● bersambung Hal 7

Title	Kukar Produksi 61 Ribu Ton beras	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Tribun Kaltim	
Page	1 Part 2	
Author	Aul	

Kukar Produksi 61 Ribu Ton Beras

● Sambungan Hal 1

Untuk meningkatkan hasil produksi, Pemkab Kukar mendorong kelompok tani bersinergi melaksanakan Gerakan Tanam 1.000 hektare lahan. Gerakan ini diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Kementan menginstruksikan seluruh daerah untuk mulai menggarap 1.000 hektare lahan sebagai akselerasi menghadapi ancaman krisis pangan. Seperti diketahui, Pemkab Kukar telah menunjuk enam kecamatan untuk program pertanian terpadu. Keenamnya yaitu Tenggara-rong, Tenggara-rong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, dan Marangkayu.

Enam kecamatan ini dibagi lima kawasan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ-MD) Kukar. Kawasan pertama adalah Sebulu- Muara Kaman yang meliputi Desa Sumber Sari, Manunggal Jaya, Cipare

Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya, dan Bunga Jadi. Luas kawasan pertanian terpadunya 1.520 hektare.

Kawasan kedua di Tenggara-rong Seberang yang terdiri dari Desa Bangun Rejo, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, Bukit Raya, Loa Lepu, Teluk Dalam, Loa Ulung, dan Embalut. Lahan yang disiapkan untuk pertanian terpadu sekitar 1.650 hektare. Kawasan ketiga juga di Tenggara-rong Seberang dengan lahan 2.160 hektare. Kawasan ini terletak di Desa Kertabuana, Buana Jaya, Bukit Partaman, Sukamaju, dan Separti.

Kawasan keempat di Kecamatan Tenggara-rong dan Loa Kulu yang meliputi Kelurahan Bukit Biru, Jahab, Desa Jembayan, Sumber Sari, Sepakat, Ponoragan, dan Rempanga. Luas lahannya 1.216 hektare. Terakhir, kawasan kelima di Marangkayu yang meliputi Desa santan Ulu, Semangko, dan Sebuntal dengan luas 1.082 hektare.

Kunker Dua Hari


Gubernur Isran Noor dijadwalkan berkeliling Kabupaten Kutai Kartanegara selama dua

hari. Setidaknya, ada empat agenda yang harus dijalani oleh orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu.

Selama berada di kabupaten yang kaya akan migas dan emas hitam pada 3-4 Juli 2023, Gubernur Isran Noor akan menyambangi tiga kecamatan. Kunjungan lapangannya itu menyisir kecamatan di zona tengah dan hulu. Mulai Kecamatan Tenggara-rong hingga Kembang Janggut dan Tabang.

Adapun, empat agenda yang akan dijalani di Kutai Kartanegara di antaranya Gerakan Penanaman Padi 1000 Hektare dan Penyerahan Bantuan di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggara-rong.

Kedua, Peninjauan Program Prioritas Rumah Layak Huni dan Penyerahan Bantuan di Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut. Ketiga, Peresmian dan Serah Terima Jembatan Belayan di Kecamatan Tabang. Dan, Penanaman Pohon Program Prioritas Pangan untuk Penghijauan di Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang. (aul)

Title	Siklus Menyejahtakan Peternak	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	Mukhamad Kurniawan	

PETERNAKAN

Siklus Menyejahtakan Peternak

Dengan neraca yang diperkirakan surplus, kenapa harga daging ayam ras terus naik beberapa bulan terakhir? Tak hanya menyumbang inflasi, kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan konsumen sekaligus pedagangnya. Sebagian pedagang di sejumlah daerah, seperti Cirebon, Cikarang, Karawang, dan Jabodetabek bahkan berunjuk rasa dengan mogok jualan pekan lalu.

Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pangan Nasional (National Food Agency/ NFA) dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Senin (5/6/2023), di Jakarta, produksi daging ayam nasional tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,9 juta ton. Dengan stok awal 150.489 ton dan perkiraan kebutuhan 3,5 juta ton, surplus daging ayam ras pada akhir Desember 2023 diperkirakan mencapai 563.097 ton.

Kementerian Pertanian dalam "Outlook Komoditas Daging Ayam 2022" menyebut, berdasarkan proyeksi produksi dan konsumsi, neraca daging ayam ras di Indonesia akan surplus selama kurun waktu

2022-2026. Pada 2022, surplus diperkirakan mencapai 764.650 ton, sementara surplus tahun ini diproyeksikan sekitar 277.670 ton. Penurunan surplus itu sejalan dengan berkurangnya populasi ayam ras pedaging.

Menurut Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, populasi ayam ras pedaging nasional naik 9,66 persen dari 2,89 miliar ekor tahun 2021 menjadi 3,17 miliar ekor tahun 2022 (angka sementara). Namun, populasinya turun 1,6 persen menjadi 3,12 miliar ekor pada 2023. Pemangkasan produksi biasa ditempuh untuk mengantisipasi kelebihan pasokan daging ayam ke pasar sekaligus anjloknya harga di tingkat peternak.

Akan tetapi, apakah penurunan itu berdampak pada kenaikan harga daging ayam belakangan ini? Dua bulan terakhir, harga rata-rata daging ayam ras nasional berkisar Rp 38.000 per kilogram (kg) hingga Rp 40.000 per kg. Pada Senin (3/7), harga rata-rata nasional daging ayam ras menurut Panel Harga Pangan NFA Rp 38.690 per kg, sementara menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Rp 40.050 per kg. Angka itu berada di atas harga acuan penjualan di konsumen, yakni Rp 36.750 per kg.

Situasi harga di pasar merupakan cermin yang pas untuk melihat permintaan dan penawaran. Tren kenaikan harga daging ayam beberapa bulan terakhir bisa jadi sejalan dengan kebijakan "koreksi" populasi. Selama ini, langkah mengegas dan mengerem produksi adalah jurus yang ditempuh pemerintah guna menjaga pasokan sekaligus harga di tingkat peternak agar tidak anjlok.

Ongkos naik

Dengan produksi yang surplus setiap tahun, langkah ideal menjaga harga di tingkat peternak adalah dengan menggenjot permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain mendongkrak konsumsi per kapita, ekspor jadi pilihan ideal untuk menyerap kelebihan produksi. Sayangnya, pilihan ini belum diusahakan optimal.

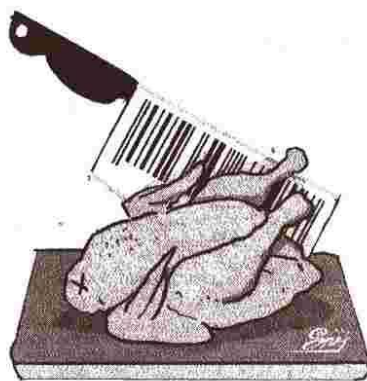
Selain permintaan dan penawaran, ada faktor di hulu yang dituding mendongkrak harga daging ayam belakangan ini, yakni kenaikan ongkos produksi. Biaya produksi, antara lain, terdorong oleh kenaikan harga jagung. Dengan porsi mencapai 50 persen dalam struktur pakan, kenaikan

harga jagung serta-merta mendongkrak ongkos pakan sekaligus produksi ayam.


Pekan lalu, harga jagung pakan dilaporkan mencapai Rp 6.000 per kg. Angka itu jauh di atas harga acuan, yakni Rp 4.200 per kg di petani dan Rp 5.000 per kg di peternak. Pemerintah bisa saja memperlebar izin impor jagung guna meredam harga jagung sekaligus pakan dan produk unggas. Namun, kalangan petani jagung mewanti-wanti sejak awal tahun: jangan impor jagung secara berlebihan agar petani tetap bersemangat menanamnya!

Kebijakan mengerem impor jagung sejak 2017/2018 terbukti mendongkrak produksi jagung nasional. Langkah itu "menyakitkan" di awal, tetapi secara tak langsung membangkitkan motivasi petani untuk menanam. Kini, siklus serupa sedang terjadi pada komoditas pangan lain, seperti beras, tebu, serta daging dan telur ayam. Harga yang terjadi di pasar dinilai menguntungkan sehingga gairah berproduksi timbul.

Jangan matikan semangat peternak dengan buru-buru meredam harga daging ayam di pasaran. Toh, kenaikannya masih terbilang wajar. Biarkan mereka menjalani siklus penyehatan. (MUKHAMAD KURNIAWAN)



SUPRIYANTO

Title	Lobar Masih Surplus Beras 32 Ribu Ton	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Radar Lombok	
Page	10	
Author	Ami	



PANEN: Petani di Lombok Barat sedang panen. Hingga saat ini Lombok Barat masih surplus beras.

FAHMIRADAR LOMBOK

Lobar Masih Surplus Beras 32 Ribu Ton

GIRI MENANG - Luas lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat setiap tahun mengalami penyusutan karena alih fungsi lahan yang terus dilakukan untuk pembangunan perumahan maupun pembangunan lainnya. Padahal Pemkab Lombok Barat tetap berupaya daerah ini menjadi kabupaten yang menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak andalan.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan saat ini luas lahan sawah masih ada sekitar 15.197 hektar. "Luas lahan sawah ini cenderung berkurang setiap tahun karena perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan

berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah," paparnya kemarin.

Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang. Pada tahun 2022 lalu produksi padi mencapai 182.017,36 ton dengan ketersediaan beras sebesar 114.197,69 ton sementara itu kebutuhan beras di Kabupaten Lombok Barat dari total jumlah penduduk 731 ribu jiwa sebesar 81.564,98 ton. Itu artinya Lombok Barat masih surplus beras sebesar 32.632,71 ton. "Lombok Barat masih surplus beras 32 ribu ton," tegasnya.

Meskipun masih surplus, lanjut Wabup, Lobar tidak luput dari berbagai permasalahan di sektor pertanian. Lombok Barat


mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani.

Pantauan Koran ini di wilayah Lombok Barat sedang musim panen padi musim tanam kedua. Seperti di Kecamatan Gerung, petani sedang melakukan aktivasi panen, ada petani yang melakukan panen secara tradisional. Salah satu petani, Ramli, menyebut dirinya sedang panen padi bersama dengan petani lainnya. "Iya ini sedang panen," katanya.

Sebelumnya saat hadir di acara panen padi di Desa Tempos Kecamatan Gerung beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong

petani dalam melakukan kegiatan panen menggunakan mesin combain, karena jika panen menggunakan mesin, hasil lebih banyak yang didapatkan dibanding panen dengan cara manual. Menteri memberikan bantuan kepada Lombok Barat berupa alat-alat pertanian, berupa combain dan peralatan lainnya.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat H. Lalu Winengan mengatakan, bantuan alat pertanian yang disebut menteri semuanya untuk Lombok Barat, sedangkan kalau bantuan berupa sapi, kambing dan ayam, untuk pemerintah provinsi. "Kalau bantuan alat pertanian semua untuk Lombok Barat," kata Winengan. **(ami)**

Title	Mas Dhito Genjot Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian di Bumi Panjalu	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Harian Bhirawa	
Page	10	
Author	Van.pkp.adv	



Mas Dhito Genjot Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian di Bumi Panjalu

Kediri, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Kediri secara berkala terus melakukan peningkatan sarana prasarana pertanian guna mendukung pertanian di Bumi Panjalu.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Widodo menyebut, sebagai salah satu program prioritas Bupati Hanindhito Himawan Pramana, pengembangan kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan komoditas saat ini diutamakan.

Peningkatan sarana prasarana pertanian baik melalui sumber dana APBN maupun APBD terus dilakukan sejak awal kepemimpinan bupati muda itu. Diungkapkan, bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dilakukan melalui pola hibah uang, dengan harapan bantuan yang diberikan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan petani. "Karena lahan di masing-masing daerah berbeda, kadang peralatan ini perlu dilakukan custom. Melalui pola hibah uang tersebut, alsintan yang dibutuhkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal," katanya, Senin (26/6/2023).

Pada tahun 2023 ini, sampai dengan Bulan Juni bantuan alsintan yang siap disalurkan berupa 3 unit traktor roda empat, 10 unit traktor roda 2, 21 unit cultivator. Selain alsintan, prasarana pertanian terus dikembangkan dan ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitas pertanian. Pekerjaan yang segera dilakukan sebanyak 28



unit pekerjaan. Fincianya, pekerjaan rehab saluran irigasi tersier di 10 titik dan jalan usaha tani 18 titik.

Adapun, pada tahun 2021 - 2022, ada 2.880 unit alsintan yang diperbantukan kepada petani. Alsintan tersebut disalurkan untuk mendukung usaha pertanian pada tahap penyiapan lahan, budidaya maupun pasca panen.

Sedang, dalam bidang prasarana pertanian telah dibangun saluran irigasi sepanjang 14.412 meter sebanyak 62 lokasi, jalan usaha tani sepanjang 8.544 meter sebanyak 35 lokasi.

"Jalan usaha tani ini diharapkan bisa mempermudah transportasi dari sarana produksi sampai hasil pertanian, bentuknya cor beton," bebernya. Kemudian, irigasi tanah dangkal sebanyak


50 lokasi, embung sebanyak 4 unit, dam parit sepanjang 2.899 meter sebanyak 12 lokasi dan pipanisasi sepanjang 3.378 meter sebanyak 4 lokasi.

Pembangunan sarana prasarana tersebut untuk mendukung program prioritas Bupati di empat kawasan Agropolitan baik itu Palempari, Pakancung, Ngawasondat dan Segobatom.

Program pembangunan sarana pertanian yang dilakukan itu dilaksanakan melalui pola hibah uang. Pengerjaan pembangunan seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani dilakukan petani dan masyarakat sekitar. "Selain menghasilkan jalan usaha tani dan saluran irigasi, multi player effectnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat seperti sistem padat karya namun tetap ada konsultan perencana dan pengawas pendamping," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI di Padang Sumatera Barat Kamis (15/6/2023) lalu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian RI. Penghargaan diterima bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito tersebut atas dedikasi, kontribusi, dan keberhasilannya dalam membangun bidang pertanian di Kabupaten Kediri. [van.pkp.adv]



Title	Akademisi: Penyuluhan Pertanian Perlu Didukung Anggaran Pendidikan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Cianjur Ekspres	
Page	3	
Author	Ant	

Akademisi: Penyuluhan Pertanian Perlu Didukung Anggaran Pendidikan

JAKARTA - Kalangan akademisi menilai penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan negara dari anggaran sektor pendidikan.

Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyatakan penyuluhan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan pelaku utama baik petani, nelayan, pekebun, dan peternak, yang merupakan kewajiban dari pemerintah sekaligus hak warga negara.

"Keberadaan kelembagaan penyuluhan menjadi pembangkit semangat bagi petani, peternak, nelayan, pekebun sebagai pelaku utama dan pelaku usaha," ujarnya saat bedah buku "Penyuluhan Pertanian Masa Depan" di Jakarta.

Menurut dia, saat ini penyuluhan pertanian di daerah-daerah tidak memiliki wadah atau kelembagaan tersendiri setelah dihapuskannya Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh).

Kondisi tersebut, lanjutnya, meniadakan penyuluh ditarik

sebagai tenaga-tenaga pada dinas-dinas yang ada di daerah, sehingga status mereka sebagai pegawai penda atau aparatur sipil negara (ASN) eselon 4 atau 5.

"Artinya, mereka bukan siapa-siapa, sehingga apresiasi terhadap penyuluh tidak ada yang akhirnya berdampak pada pekerjaan utama mereka," ujar pengajar Pascasarjana IPB University itu.

Bustanul menyatakan 60 persen yang dikerjakan penyuluh bukan memberi penyuluhan, tapi justru pekerjaan administrasi di luar kepenyuluhan dan bahkan mengikuti berbagai macam tim proyek agar mendapatkan tambahan penghasilan.

Akhirnya, pekerjaan administrasi tersebut menumpuk. Setiap bulan harus membuat laporan hingga sembilan laporan, sehingga pekerjaan utama sebagai penyuluh tak terurus," katanya.

Saat ini, lanjutnya, anggaran untuk program penyuluhan sangat kecil dibandingkan produk domestik bruto (PDB) secara nasional dan hal itu sangat berbeda sekali dengan Filipina dan China yang mau

sektor pertaniannya, karena anggaran untuk riset dan penyuluhan cukup besar.

"Kalau kesejahteraan (penyuluh) rendah, bagaimana mereka memikirkan kesejahteraan orang lain," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu, anggaran untuk program penyuluhan bisa diambilkan dari alokasi sektor pendidikan yang sangat tinggi atau 20 persen dari APBN.

Senada dengan itu, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPS-DMP) Kementerian Pertanian Siti Munifah menyatakan apapun programnya, penyuluhan atau SDM penyuluh adalah orang yang menjadi penggerak dan pendamping petani.

"Penyuluhan untuk mencerdaskan pelaku utama dalam hal ini petani. Kalau digunakan untuk mencerdaskan pelaku utama, berarti pendamping dan penyuluh penting karena petani dalam proses nerialan. ilmu perlu."



Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin (tengah) bersama pembicara lain dalam bedah buku "Penyuluhan Pertanian Masa Depan" di Jakarta, Jumat (2/6/2023).


ujarnya.

Oleh karena itu, program penyuluhan sebagai bentuk pendidikan nonformal mendapatkan alokasi dari 20 persen anggaran program pendidikan nasional.

"Dengan peraturan pemerintah memungkinkan penyuluhan menjadi bagian agar anggaran sektor pendidikan setara dengan pendidikan kedinasan, difabel, distabilitas, sehingga penyuluhan tidak terdegradasi," katanya. Sementara itu, Guru Besar

Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB University Sumardjo menambahkan penyuluh bukan sekadar menyampaikan pesan pembangunan, tapi juga menumbuhkembangkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

"Menumbuhkembangkan terkandung makna menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman," katanya (ant)

Title	Jangan Sembarang Bakar Daging	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Radar Bogor	
Page	1 Part 2	
Author	Ded/c	

Jangan Sembarang Bakar Daging

■ Sambungan dari Hal 12

Temuan itu merupakan hasil pemeriksaan tim gabungan DKPP bersama mahasiswa Polbangtan Kementerian Pertanian, Sekolah Vokasi IPB University, BPMSPH Kementerian Pertanian, Ditjen PKH, dan PDHI Jabar 2. Dua kasus terdeteksi di Kecamatan Bogor Utara, satu kasus di Kecamatan Bogor Timur, dan satu kasus di Bogor Barat.

Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Bogor, drh Anizar, menjelaskan temuan itu hasil sampel bagian penyembelihan. Kemudian bagian daging hewan yang terpapar penyakit cacing langsung dilakukan pemilahan untuk dibuang sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun dari keempat kasus

itu, temuan di Kecamatan Bogor Barat belum bisa dipastikan. Hingga berita ini diturunkan, DKPP masih mengonfirmasi temuan di lokasi tersebut.

Menurut Anizar, kasus cacing hati pada hewan kurban memang selalu ada setiap tahunnya. Tahun ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 lalu bahkan ada temuan hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). Dia juga mengklaim, bahwa kasus ini tidak berbahaya.

"Tidak masalah, kan kita tinggal buang saja jejak yang ada di hatinya, dan dagingnya aman di konsumsi," kata drh Anizar.

Ia juga mengimbau kepada warga agar tidak membakar daging pada bagian hati. Karena dikhawatirkan masih ada telur

yang masih bisa bertahan hidup. "Jangan disate hatinya, kecuali hewannya normal, sebaiknya dimasak saja di atas 100 derajat. Karena saat kami potong hatinya pada hewan yang terpapar, kami temukan juga telur," jelas dia.

Kepala DKPP Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban secara rutin terus dilakukan. Terlebih menjelang hari H Iduladha hingga hari Tasyrik. Akan tetapi, dijelaskan Chusnul, kondisi cacing hati pada hewan kurban setiap tahunnya memang sering ditemukan. Namun lagi-lagi Chusnul menegaskan bahwa kasus itu tidak membahayakan.

Menurut informasi dokter hewan, daging hewan kurban yang terkena cacing hatinya

masih aman dikonsumsi. "Kita buang bagian yang ada cacing hatinya, dan yang lain aman untuk dikonsumsi, tidak

zoonosis juga (tidak menular ke manusia, red)," jelas dia.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta DKPP

segera menyiapkan tim khusus untuk memonitor potensi cacing hati pada produk daging, dari rumah potong hewan


(RPH) agar aman dikonsumsi. "Termasuk monitor untuk daging potong harian," tukas dia. (ded/c)

segera menyiapkan tim khusus untuk memonitor potensi cacing hati pada produk daging, dari rumah potong hewan

(RPH) agar aman dikonsumsi. "Termasuk monitor untuk daging potong harian," tukas dia. (ded/c)

(RPH) agar aman dikonsumsi. "Termasuk monitor untuk daging potong harian," tukas dia. (ded/c)

"Termasuk monitor untuk daging potong harian," tukas dia. (ded/c)

Title	Kasus Antraks Kembali Ditemukan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Harian Jogja	
Page	9	
Author	Triyo Handoko	

► PENYAKIT TERNAK

Kasus Antraks Kembali Ditemukan

WONOSARI—Penyakit antraks pada hewan ternak sapi di Gunungkidul kembali ditemukan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul mencatat lima ekor sapi sudah terinfeksi bakteri penyebab antraks yang dapat menular ke manusia, sejak November tahun lalu hingga saat ini.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Penyakit antraks awalnya menyerang sapi di Kapanewon Semanu pada November tahun lalu. "Sementara ini sejak penemuan pertama pada November itu hanya ditemukan di Semanu saja, belum menyebar ke tempat lain," kata Kepala DPKH Gunungkidul Wibawanti Wulandari, Senin (3/7).

Temuan penyakit antraks terbaru di Gunungkidul, jelas Wibawati, terjadi pada Juni lalu, masih di

► Kasus antraks terbaru ditemukan pada Juni lalu di Kecamatan Semanu.

► Masyarakat diimbau untuk melakukan langkah cepat sesuai prosedur apabila ada sapi meninggal mendadak.

Kapanewon Semanu. Awalnya ada ternak yang mengalami gejala mirip antraks, sehingga dilakukan pemeriksaan.

"Setiap sapi yang mengarah pada gejala antraks kami lakukan tes agar bisa dipastikan memang antraks atau bukan. Terakhir ditemukan antraks yang menyerang sapi pada Juni kemarin," kata dia.

Wibawanti menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai penanganan untuk mencegah penularan antraks sehingga tidak semakin meluas. "Vaksin dan antibiotik sudah berjalan, kemarin sebelum hari raya [Iduladha] sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian," ujarnya.

DPKH Gunungkidul, lanjut Wibawati, juga sudah menyediakan berbagai obat-obatan untuk menangani sapi yang terkena antraks. Namun demikian ia tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah cepat

sesuai prosedur apabila ada sapi meninggal mendadak.


"Untuk stok obat-obatan kami pastikan aman, kami imbau juga kepada masyarakat agar ketika ada hewan ternak mati mendadak secepatnya dikubur dan tidak dikonsumsi," jelasnya.

Daging sapi yang terkena penyakit antraks dapat menularkan bakteri yang mampu menyerang paru-paru manusia yang mengonsumsinya. "Penyakit antraks dapat menular ke tubuh manusia dan bisa berakibat fatal, maka perlu untuk berhati-hati," terangnya.

Kasus antraks yang menular ke manusia di Gunungkidul pernah terjadi pada Januari lalu. Kasus itu diketahui setelah adanya pemeriksaan terhadap seorang warga Kapanewon Karangmojo yang kemudian dinyatakan positif terinfeksi antraks.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Nilai Tukar Petani Sulsel Naik 1,46%	
Date	4 Juli 2023	
Media	Tribun Timur	
Page	3	
Author	Rud	

Nilai Tukar Petani Sulsel Naik 1,46 %

MAKASSAR, TRIBUN - Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2023 sebesar 106,13. Angka tersebut naik 1,28 persen jika dibandingkan dengan NTP Mei 2023 sebesar 104,79.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Aryanto, mengatakan kenaikan ini dipengaruhi oleh dua indikator.

Pertama indikator indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 121,73 atau mengalami kenaikan 1,46 persen.

Kedua indikator indeks harga

yang dibayar petani (Ib) sebesar 114,70 atau mengalami kenaikan 0,18 persen. Adapun komoditas penyumbang harga yang diterima petani adalah kakao atau coklat biji, cengkeh, gabah, dan jagung.

Sementara komoditas penyumbang harga yang dibayar petani adalah layang, makanan ringan, rokok kretek dan filter.


"Inilah komoditas yang menyumbang nilai indek harga yang dibayar petani, sehingga secara keseluruhan nilai NTP Sulsel mengalami kenaikan 1,28 persen," kata Aryanto, dalam

konferensi pers Berita Resmi Statistik melalui YouTube BPS Sulsel, Senin (3/7/2023).

Sekadar diketahui, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. **(rud)**

Title	Tak Laku, Lebih dari 1000 Ekor Sapi dari NTB akan Dipulangkan dari Jabodetabek	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	3	
Author	Bul	

Tak Laku, Lebih dari 1000 Ekor Sapi dari NTB akan Dipulangkan dari Jabodetabek



(Suara NTB/bul)
Muh. Riadi

Mataram (Suara NTB) -

Lebih dari seribu sapi yang dikirim dari Provinsi NTB akan dibawa pulang kembali dari Jabodetabek, setelah tidak seluruhnya laku dijual pada momentum Idul Adha 1444H/2023 ini. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi di ruang kerjanya, Senin (3/7) kemarin mengatakan, ada puluhan perusahaan yang mengirim sapi untuk kurban ke Jabodetabek untuk dijual memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.

Dinas Nakeswan setidaknya merekomendasikan 19.125 ekor sapi sejak sebulan sebelum lebaran Idul Adha. Rekomendasi pengeluaran diterbitkan berdasarkan permintaan karena adanya peluang pasar di Jabodetabek. "Kita terbitkan rekomendasi pengeluaran berdasarkan peluangnya di sana di Jabodetabek. Sesuai rekomendasi penerimaan di sana. Untuk rekomendasi pengeluaran tidak bisa sembarangan. Harus lihat dulu peluang pasarnya di sana," katanya.

Rupanya, tidak seluruhnya sapi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ini terjual di Jabodetabek. Pertama, bisa saja karena faktor banyaknya sapi-sapi dari daerah lain yang juga masuk ke Jabodetabek secara bersamaan. Kedua, bisa juga karena faktor daya beli yang menyebabkan banyaknya hewan-hewan kurban yang laku.

Kepala Dinas mengatakan, banyaknya hewan kurban yang tidak terjual ini juga turut menjadi perhatian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Terutama sapi-sapi dari Provinsi NTB menjadi atensi. Mengapa demikian? NTB sampai saat ini tercatat sebagai provinsi bebas penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) atau penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae.

Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung, dan perut. Selain benjolan, sapi yang terinfeksi LSD juga dapat mengalami demam, kehilangan nafsu makan, lesu, dan mengalami penurunan produksi susu. "Kalau sapi-sapi ini dibawa balik lagi ke NTB, penyakit LSD yang dikhawatirkan. Apalagi sapi-sapi ini pulang melintasi daerah sumber LSD, yaitu di Jawa Tengah," ujarnya.

Untuk pemulangan kembali sapi-sapi yang tidak laku ini, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, sapi-sapi ini tidak bisa dibawa langsung ke pemilik asalnya. Harus dilakukan karantina di kawasan khusus. Selama masa karantina ini, sapi-sapinya juga harus divaksin, selain harus disiapkan pakan yang mencukupi selama masa karantina.


Riadi menambahkan, sapi-sapi ini sebetulnya bersedia dibeli oleh dua BUMN, dan salah satu pengusaha dari Palembang. Namun hitungan harganya dianggap belum masuk, ditambah biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya. "Ini kita sedang bahas melalui zoom, termasuk dengan pengusahanya, dengan Sesditnakeswan untuk mencari formula. Termasuk kita masih meminta laporan berapa angka pasti sapi yang tidak laku ini," demikian Riadi. (bul)

Title	BPS CATAT INFLASI INDONESIA TURUN	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	5	
Author	Neraca/Antarafoto/Asep Faturahman/foc	



NERACA/Antarafoto/Asep Faturahman/foc.

BPS CATAT INFLASI INDONESIA TURUN : Pedagang sayur melayani pembeli di Pasar Induk Rau Kota Serang, Banten. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Senin (3/7/2023) mengatakan, BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,14 persen pada Juni 2023 (month-to-month/mtm). Capaian tersebut membuat angka inflasi turun dari tahun ke tahun (year-on-year/yoy) menjadi 3,52 persen jika dibandingkan dengan Juni 2022. Adapun penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Juni 2023 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,39 persen dan andil 0,10 persen.

Title	Inflasi Tahunan 2023 Diprediksi Tidak Jauh dari 4%	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/Ant	

Inflasi Tahunan 2023 Diprediksi Tidak Jauh dari 4%

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia secara keseluruhan sepanjang tahun 2023 tidak akan jauh dari level 4 persen. "Inflasi diperkirakan akan mulai kembali meningkat pada akhir tahun nanti. Meskipun demikian secara keseluruhan tahun, inflasi di Indonesia tidak akan jauh dari angka 4 persen," kata Piter, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurutnya, sektor transportasi tetap menjadi sektor yang paling berpotensi mendorong meningkatnya inflasi untuk tahun ini. Hal tersebut dikarenakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung masih tinggi dengan tingkat permintaan (demand) yang juga tinggi.

Hal tersebut wajar bila dibandingkan dengan kondisi tahun lalu ketika peran sektor transportasi terhadap inflasi masih rendah imbas dari pandemi. Namun, saat pandemi berakhir pada tahun ini, terjadi peningkatan permintaan BBM yang cukup tinggi sehingga berdampak pada sumbangsih sektor transportasi terhadap tingkat inflasi Indonesia.

Meskipun demikian, Piter memprediksi inflasi yang besar di sektor transportasi hanya akan terjadi pada tahun ini. Tahun depan, inflasi pada sektor transportasi diperkirakan akan mereda. Lebih lanjut, Piter menjelaskan, meskipun tingkat inflasi bulanan Juni sebesar 0,14 persen (mtm) meningkat dibandingkan bulan Mei yang sebesar 0,09 persen (mtm), namun secara tahunan (yoy) tingkat inflasi Indonesia mengalami adanya tren penurunan.


Inflasi tahunan pada Juni 2023 tercatat sebesar 3,52 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan sejak Maret 2023, yakni sebesar 4,97 persen, 4,33 persen, 4 persen, dan 3,52 persen secara berturut-turut.

"Hal ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan. Inflasi tahun 2023 pada mulanya diperkirakan akan cukup tinggi di kisaran 4 - 4,5 persen seiring dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi dan gejolak global yang menyebabkan tingginya harga energi dan barang-barang pangan. Tetapi tren inflasi di Indonesia terus menunjukkan penurunan," jelas Piter.

Adapun BPS mencatat penyumbang inflasi tahunan terbesar pada Juni 2023 adalah kelompok transportasi yang mencatatkan inflasi sebesar 10,18 persen dan memberikan andil sebesar 1,23 persen terhadap inflasi umum.

Penyumbang inflasi terbesar berikutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 2,85 persen, serta kontribusi 1,13 persen. Kelompok berikutnya adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 2,49 persen dan andil 0,48 persen.


Adapun kelompok yang mengalami deflasi pada inflasi tahunan Juni 2023 adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang tercatat sebesar 0,23 persen dengan andil 0,01 persen. Bila dilihat dari kelompok komoditas, penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Juni 2023 adalah bensin dengan andil sebesar 0,84 persen, beras 0,38 persen, rokok kretek filter 0,22 persen, kontrak rumah 0,13 persen, dan bahan bakar rumah tangga 0,12 persen terhadap inflasi umum. [#bari/ant](#)

Title	PAMERAN PRODUK UNGGULAN PERTANIAN	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Neraca/Antarafoto/Adeng Bustomi/nz	



ERACA/Antarafoto/Adeng Bustomi/nz

PAMERAN PRODUK UNGGULAN PERTANIAN : Pengunjung memasuki area pameran hasil pertanian dalam rangkaian Hari Krida Pertanian (HKP) di Stadion Atletik Prabu Linggabuana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (3/7/2023). Pameran yang diikuti 27 kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Ciamis menampilkan produk unggulan pertanian dalam upaya menarik minat masyarakat agar turut serta dalam menjaga ketahanan pangan. N

Title	Perkebunan Pendorong Naiknya NTP Bulan Juni 2023	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

Perkebunan Pendorong Naiknya NTP Bulan Juni 2023

NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan perkembangan nilai tukar petani atau NTP pada periode Juni 2023 mencapai sebesar 110,41 atau naik sebesar 0,19 persen apabila dibandingkan dengan nilai NTP di bulan sebelumnya. Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani alias IT naik sebesar 0,42 persen atau lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani yang hanya sebesar 0,23 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini mengatakan bahwa ada 4 komoditas dominan yang mempengaruhi kenaikan NTP di bulan Juni. Dari 4 komoditas tersebut, 2 komoditas dari perkebunan, yakni kopi, kakao sapi potong dan cabe rawit.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada sub sektor hortikultura dimana NTP hortikultura ini naik sebesar 2,22 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,39 persen atau lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen," ujar Pudji.

Pudji mengatakan selain NTP kenaikan juga terjadi pada Nilai Tukar Usaha Petani alias NTP yang mencapai 111,11 atau naik 0,33 persen apabila dibandingkan pada NTUP Mei 2023. Menurutnya, kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,42 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang mengalami kenaikan sebesar 0,08

persen. "Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan NTUP atau ini adalah kopi, sapi potong, kakao/coklat biji dan cabe rawit dengan peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada sub sektor hortikultura yang mencapai 2,29 persen. Kenaikan terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,39 persen atau lebih tinggi dari kenaikan BPPBM yang mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen," kata Pudji.

Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM sub sektor hortikultura adalah bibit bawang merah, bibit kentang, upah mencangkul dan upah menuai atau upah memanen.

Seperti diketahui, sebaran perkembangan NTP dan NTUP antar wilayah pada Juni 2023 mencapai 21 provinsi yang naik dengan peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Lampung sebesar 2,79 persen. Untuk nilai tukar usaha petani sebanyak 21 provinsi mengalami kenaikan NTUP dengan peningkatan tertinggi terjadi di Lampung sebesar 3,03 persen.

Sebelumnya, pada Maret 2023 kembali naik, mencapai 110,85 atau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,29 persen apabila dibandingkan dengan Februari 2023. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,53 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya 0,24 persen. Naiknya NTP dipengaruhi oleh komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, dan kopi.

Pudji mengatakan bahwa komoditas dominan dalam mempengaruhi

kenaikan NTP diantaranya adalah kelapa sawit, jagung, cabai rawit dan kopi. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mencapai 128,79 atau lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya 116,19 persen.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 1,94 persen. Adapun komoditas yang dominan dalam mempengaruhi kenaikan ini adalah kelapa sawit, kopi dan karet," ujar Pudji.

Selain NTP, kenaikan juga terjadi pada Nilai Tukar Usaha Petani atau NTUP. Tercatat, NTUP pada bulan Maret mencapai 111,18 atau naik 0,40 persen apabila dibandingkan Februari 2023. Kenaikan terjadi karena indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 115,84.

"Peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 2,02 persen. Begitu pun hortikultura yang meningkat sebesar 2,01 persen," kata Pudji.

Selain itu, BPS juga mencatat adanya kenaikan NTP di 26 Provinsi Indonesia dengan peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 4,35 persen. Demikian juga dengan NTUP yang sama-sama meningkat di 26 provinsi.

Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah pun mengakui, perkebunan merupakan sub sektor penting dalam mendorong perekonomian negara.

Dalam pengembangannya tak dapat dipungkiri terus dihadapkan berbagai tantangan. @gro

Title	Stabilisasi Pasokan dan Harga GKP Harus Dijaga
Date	4 Juli 2023
Media	Neraca
Page	10
Author	Gro



Kementerian Pertanian

Stabilisasi Pasokan dan Harga GKP Harus Dijaga

Jakarta - Sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga gula konsumsi nasional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerbitkan Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih Di Tingkat Petani.

■ NERACA

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, Penerbitan SE ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung.

"Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung. Selain itu, ini juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan. Dengan pendapatan yang baik diharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebu nya semakin tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," ujar Arief.

Arief mengatakan, SE ini memuat pedoman tentang harga pembelian gula kristal

putih (GKP) di tingkat petani. Dalam SE disebutkan agar pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp 12.500/ kilogram (kg).

"Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani," terang Arief.

Menurut Arief, penerbitan SE ini untuk mempercepat penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 yang juga mengatur tentang harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen. "Adapun, saat ini draft Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 telah melalui proses harmonisasi antar Kementerian dan Lembaga serta

masih dalam proses pengundangan," jelas Arief.

Harga pembelian GKP di tingkat petani yang baru ini mengalami peningkatan dibanding ketentuan sebelumnya yang mengacu kepada Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 (sebelum rencana perubahan). "Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp 1.000 per Kg, dari Rp 11.500 per Kg menjadi Rp 12.500/kg," ujar Arief.

Sehingga untuk memastikan agar pemberlakuan harga pembelian di tingkat petani tersebut berjalan dengan baik dan presisi, Arief menyampaikan, Badan Pangan Nasional telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawalan implementasi harga di lapangan.

"Badan Pangan Nasional telah bersurat kepada Satgas Pangan Polri meminta dukungan dan bantuan dalam hal sosialisasi dan pengawalan kebijakan harga tersebut di lapangan. Seperti kita ketahui, jaringan Polri sangat luas dan masif di seluruh Indonesia, kita berharap dengan kerjasama yang baik antara ini kebijakan penyesuaian harga gula konsumsi dapat berjalan secara merata dan tepat sasaran sehingga berkontribusi signifikan bagi penguatan ekosistem gula nasio-

nal ke depan," papar Arief.

Lebih lanjut, Arief juga mengungkapkan, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani ini tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi. Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah terjadi kenaikan BPP dari Rp. 589.229 per ton tebu menjadi Rp. 650.000/ton tebu atau naik 9,08%.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilangan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini, sebagai mana arahan Bapak Presiden," ucap Arief.

Dalam hal proses pembahasan penyesuaian harga gula konsumsi ini, Arief memastikan, Badan Pangan Nasional mendengar masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder pergulaan nasional, seperti Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTTRI), Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO), serta pelaku usaha. "Asosiasi dan pelaku usaha mengusulkan agar dilakukan penyesuaian harga gula konsumsi, baik di tingkat produsen maupun

konsumen," terang Arief.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya dan sigapantisipasi untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan gula nasional. Demi mencapai swasembada gula konsumsi tahun 2024 Kementan berupaya mendorong peningkatan produksi gula melalui ekstensifikasi dan intensifikasi tebu.

Meski begitu, dalam pengembangan komoditas tebu tidaklah mudah, dihadapkan berbagai tantangan, namun itu tidak menghentikan langkah pemerintah mencari solusi tepat guna demi mendorong dan meningkatkan produksi tebu maupun gula. Peningkatan produksi ini wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional serta antisipasi kemungkinan krisis global.

"Demi mencapai swasembada gula konsumsi tahun 2024 Kementerian Pertanian berupaya mendorong peningkatan produksi gula melalui ekstensifikasi penanaman luas areal tanaman tebu dan intensifikasi melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon," ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan.

Sebelumnya pembahasan telah dilakukan dalam beberapa kali putaran dengan melibatkan Kementerian terkait. ●gro

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN


Title	Pupuk Subsidi Sulit, Pinto Minta Kementan Perhatikan Petani Jambi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Juli 2023	
Media	Jambi Independent	
Page	12	
Author	Enn/muz	



Foto bersama dan penyerahan cendera mata kepada Kementan RI.

Pupuk Subsidi Sulit, Pinto Minta Kementan Perhatikan Petani Jambi

JAMBI - Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan Konsultasi ke Kementerian Pertanian terkait alokasi Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jambi.

Dalam hal ini terdapat banyak aspirasi masyarakat Jambi yang dibawa oleh DPRD Provinsi Jambi terkait pupuk bersubsidi. Salah satunya penghapusan subsidi pupuk untuk tanaman potensial di Jambi, seperti nenas, kentang, sawit, dan lain sebagainya. Yang mana pada tanaman tersebut, juga menyumbangkan PAD bagi Provinsi Jambi.

Hal tersebut menjadi perhatian bagi Pinto Jayanegara,

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, yang juga memimpin pertemuan itu. Ia mengungkapkan, keluhan dari petani saat ini adalah dihapuskannya pupuk bersubsidi, terutama tanaman potensial. "Kita

menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya para petani terkait pupuk bersubsidi ini. Karena banyak komoditas pupuk yang disubsidi dihapuskan oleh pemerintah. Dan kisaran 70-an komoditas, sekarang hanya tinggal sembilan komoditas yang disubsidi," katanya.

Pada kesempatan yang sama pula, Pinto mengatakan bahwa ini harus menjadi perhatian penuh bagi Kementan, dan juga ia mendapat keluhan dari Petugas Lapangan Penyalur Pupuk Subsidi, bahwa honoraria terpengkas.

"Selain itu, kita juga



Pinto memimpin pertemuan dengan Kementan RI.



Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi berbincang dengan penyuluh.

mendapatkan kalau petugas di lapangan itu hanya diberi honor Rp 99.500 perbulan yang semula itu 350.000 perbulan. Disamping uang pulsa, ini kan perlu juga jadi catatan penting bagi Kementan untuk mempertimbangkan kembali

honor dari petugas lapangan tersebut," katanya.

Pada akhir pertemuan itu, Pinto meminta hal ini harus diperhatikan serius oleh Kementan. Karena ini menyangkut kehidupan para petani, khususnya yang ada

di Jambi.

"Di akhir pertemuan tadi saya sampaikan bagaimanapun caranya, kita harus mencari jalan keluar terkait keluhan para petani ini. Jangan sampai mereka menjerit akibat pupuk yang mahal, kasihan

mereka. Dan kita pun akan terus memantau perkembangannya, sehingga perlu nanti kita akan jadwalkan rapat dengan gubernur terkait ini, dan serta hearing kepada Pak Menteri langsung," tutup Pinto. **(enn/muz)**



Diskusikan bersama pihak Kementan RI.



Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.